LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TA 2024

DINAS KETAHANAN PANGAN
DAN PERIKANAN

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024 dapat tersusun dengan baik, sebagaimana yng diamanatkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024 dan merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi serta penggunaan anggaran kegiatan selama tahun 2024. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur yang disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang akan terus berupaya menyempurnakan strategi dan kebijakan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian sasaran organisasi, sehingga diharapkan di masa yang akan datang, capaian semua sasaran dapat lebih optimal.

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Penyajian LKjIP ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien, transparan dan berkelanjutan di masa mendatang dalam upaya mewujudkan sasaran pembangunan urusan pangan dan perikanan di wilayah Kabupaten Jombang.

Jombang, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik

SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si
NIP 197605012001121002

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya, sesuai dengan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Tahun 2024 dan Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Ada 3 (tiga) sasaran strategis yang harus diwujudkan sebagai penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 2024, yaitu: (1) Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat, (2) Meningkatnya Produksi Perikanan dan (3) Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah.

Tolak ukur capaian sasaran strategis pertama "Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat" dengan indikator ***Skor Pola Pangan***. Pola Pangan Harapan merupakan sebuah parameter untuk mengetahui/ memantau bagaimana kualitas konsumsi pangan masyarakat Indonesia sehingga setiap tahun perlu dilakukan survey konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan. Target Skor Pola Pangan Harapan tahun 2024 sebesar 91,86 dan realisasi kinerja sasaran, tercapai 90,5 (98,52%), realisasi Skor Pola Pangan Harapan melebihi target artinya sudah terdapat keragaman konsumsi pangan meskipun demikian dari hasil survey Skor PPH pada 9 (sembilan) kelompok pangan penyumbang energi terbesar adalah kelompok padi-padian sehingga secara umum masyarakat Kabupaten Jombang dalam pemilihan menu makanan pokok masih cenderung memilih mengkonsumsi beras sedangkan untuk proporsi konsumsi umbi-umbian, pangan hewani serta sayur dan buah masih kurang ideal karena jauh dibawah skor maksimal.

Tolak ukur capaian sasaran strategis kedua "Meningkatnya Produksi Perikanan" dengan indikator ***Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan*** dengan

target sebesar 0,20 % dapat terealisasi sebesar 0,20 %. Pertumbuhan produksi ikan tahun 2024 berhasil naik, dimana jika dibandingkan dengan tahun 2023.

Tolak ukur capaian sasaran strategis ketiga yaitu "Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah" dengan indikator ***Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah.*** Akuntabilitas kinerja perangkat daerah dinilai dari indikator Nilai SAKIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 yang terealisasi sebesar 82,96 (A) dari target 80,37 (A) dengan kategori **Memuaskan** (Nilai Angka 80-90).

Upaya untuk mencapai sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kaupaten Jombang dilakukan melalui realisasi 9 (sembilan) indikator kinerja program pada Renja tahun 2024, antara lain: (1) Persentase Cadangan Pangan Masyarakat 0,86% (capaian 101,18%), kegiatan penyisihan cadangan pangan sudah dilaksanakan oleh kelompok lumbung, (2) Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG 96% AKE dan 106,8% AKP (101%), (3) Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan dengan realisasi 0% (capaian 100%), sudah dilakukan pembinaan pada desa tahan pangan, (4) Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan dengan realisasi 100% (capaian 101,52%) (5) Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap dengan realisasi 0,13 % (92,86%), (6) Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya dengan realisasi 0,20% (100%) serta Persentase kecukupan produksi benih dengan realisasi 3,272% (90,90%) , ketersediaan benih masih belum optimal, (7) Nilai tambah hasil olahan perikanan dengan realisasi Rp. 1.782.694.477,14,- (106,42%), (8) Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur dengan realisasi 96,88%.

Penghargaan yang diraih oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang antara lain Juara Favorit Lomba Masak Ikan Kategori Menu Kudapan, Tingkat Propinsi Nasional; Penghargaan Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang Berperan Aktif dalam peningkatan konsumsi ikan di daerah; serta Juara

Harapan 1 Menu Lunch Box Cluster Sumber Karbohidrat umbi-umbian.

Pada tahun 2024, pagu anggaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebesar Rp. 11.340.809.154,-, anggaran tersebut merupakan anggaran perubahan dengan Realisasi anggaran sebesar Rp. 10.530.279.055,- (92,85%). Belum maksimalnya serapan anggaran disebabkan antara lain adanya kegagalan dalam pelaksanaan hibah bahan pangan bergizi dan gelar pangan murah dikarenakan persyaratan administrasi. Serta adanya efisien anggaran dalam pengadaan barang dan jasa. Sedangkan capaian kinerja hampir sebagian besar terealisasi sesuai target, ada beberapa indicator yang belum terealisasi sesuai target yaitu persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap, hal ini dikarenakan masih tingginya penangkapan ikan pada perairan umum darat secara destructiv.

Upaya mengatasi permasalahan tersebut adalah melalui evaluasi program kegiatan yang terdapat kegagalan sehingga dilakukan upaya untuk melakukan perbaikan seperti mengoptimalkan persyaratan administrasi pelaksanaan kegiatan, perbaikan usulan Standart Satuan Harga sehingga tidak ada silpa yang besar, mengoptimalkan kegiatan restocking sebagai salah satu upaya pengembalian ekosistem perairan umum darat serta peningkatan kolaborasi Pokmaswas (kelompok masyarakat pengawas) yang berada di sekitar perairan umum darat.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
RINGKASAN EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL vi
DAFTAR LAMPIRAN vii
BAB I. PENDAHULUAN 1
1. 1 Struktur Organisasi 1
1. 2 Tugas dan Fungsi 2
1. 3 Isu Strategis 3
1. 4 Cascading Kinerja 4
1.5 Peta Proses Bisnis 5
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi 5
1.7 Potensi dan Permasalahan 10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA 13
2.1 Perencanaan Strategis 13
2.2 Perjanjian Kinerja 15
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU) 19
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 20
A. Capaian Kinerja Organisasi 21
B. Realisasi Anggaran 50
C. Upaya Perbaikan Kinerja 67
BAB IV. PENUTUP 70

DAFTAR TABEL

2.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah 15
2.2 Perjanjian Kineja.....17
2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)… 19
3.1 Pencapaian Kinerja 21
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....28
3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d. Akhir Periode Renstra.....34
3.1.4 Perbandingan Realissai Kinerja dengan Realisasi Nasional 37
3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan anggaran.....51
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 55
3.2.3 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai ……. 58
3.2.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia ..……...61
3.2.5 Presentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana …….62
3.2.6 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana ……..67

DAFTAR LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja
2. Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja
4. Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi
5. Pengukuran Kinerja

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sesuai Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah sebagai berikut :

a. Kepala;
b. Sekretariat, berkoordinasi dengan :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
    2. Kelompok Jabatan Fungsional;
c. Bidang Ketersediaan,Distribusi dan Cadangan Pangan, berkoodinasi dengan :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional;
d. Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan Keamanan Pangan, berkoodinasi dengan :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional;
e. Bidang Produksi Perikanan, berkoordinasi dengan :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional;
f. Bidang Agribisnis, berkoordinasi dengan :
    1. Kelompok Jabatan Fungsional;
g. Kelompok Jabatan Fungsional;
h. Unit Pelaksana Teknis.

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang maka dapat digambarkan susunan/struktur organisasi Dinas sebagai berikut :

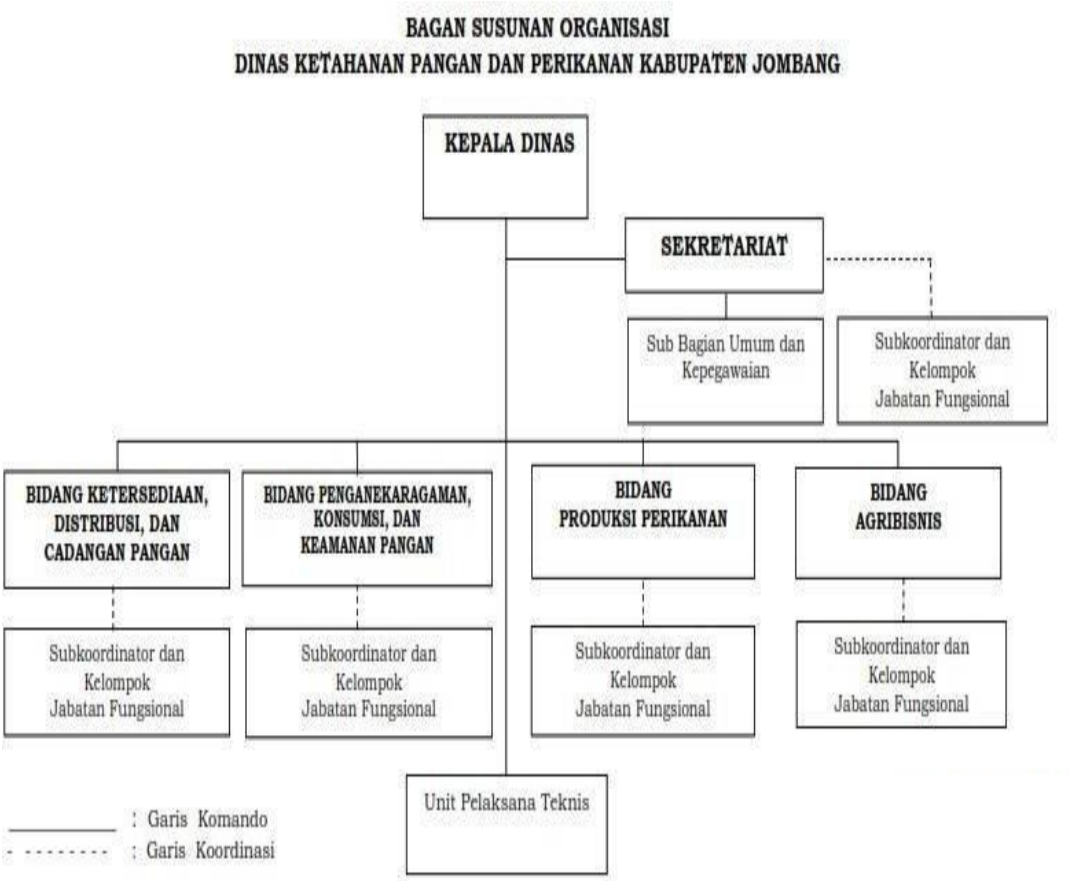

1.2 Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 90 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, tugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Jombang di bidang pangan dan bidang perikanan.

Selain menjalankan tugas pokok tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

a. Perumusan kebijakan dibidang pangan dan bidang perikanan;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pangan dan bidang perikanan;
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pangan dan bidang perikanan;
d. Pelaksanaan administrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan;
e. Penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan bidang perikanan;
f. Pembinaan penyelenggaraan fungsi-fungsi pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang pangan dan perikanan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

1.3 Isu Strategis

Isu strategis yang dihadapi oleh Kabupaten Jombang dalam pembangunan di bidang pangan dan perikanan, adalah sebagai berikut :

Urusan Pangan

1. Peningkatan peran dan fungsi kelompok lumbung dalam pengelolaan cadangan pangan masyarakat sesuai potensi local wilayah
2. Peningkatan system informasi dan logistic pangan daerah yang *up to date,* cepat dan terstandar
3. Masih rendahnya penganekaragaman serta diversifikasi konsumsi pangan masyarakat berbasis pangan lokal

Urusan Perikanan

1. Masih rendahnya produksi perikanan (budidaya dan tangkap)
2. Menurunnya kualitas Perairan Umum Daratan (PUD)
3. Rendahnya peningkatan kelas kelompok perikanan
4. Daya saing produk olahan, pemasaran olahan hasil dan konsumsi ikan masih rendah

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPD Kabupaten Jombang ditindaklanjuti ke dalam tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 2 (dua) tahun kedepan. Berdasarkan RPJPD Kabupaten Jombang 2024-2026 pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang adalah mendukung pada Misi Ke-1 dan Misi ke-3 (tiga) yaitu *"Mengembangkan Tata Kepemerintahan yang Baik"* dan *"Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Berbasis pada Sektor Pertanian dan Produk Unggulan Daerah"*.

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan mendukung sasaran RPD yaitu *Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi serta Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah, yang diselaraskan dengan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.* Adapun keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan adalah sebagai berikut :

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD	
MISI 1	Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik
TUJUAN	Meningkatkan tata Kelola pemerintahan yang professional, akuntabel, inovatif, transparan dan efektif serta penyelenggaraan digitalisasi layanan publik Indikator : Indeks Good Governance
SASARAN	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
MISI 3	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berbasis pada sektor pertanian dan produk unggulan daerah
TUJUAN	Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya Indikator : Pertumbuhan Ekonomi
SASARAN	Meningkatnya PDRB sector Unggulan dan Investasi Daerah Indikator : Pertumbuhan PDRB sektor unggulan

Rencana Strategis Perangkat Daerah	
TUJUAN PD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi Indikator : Indeks Reformasi Birokrasi
SASARAN PD	Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah Indikator : Nilai evaluasi AKIP perangkat daerah
TUJUAN PD	Meningkatkan jumlah, kualitas dan akses pangan masyarakat Indikator : Persentase pertumbuhan konsumsi pangan
SASARAN PD	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat Indikator : Skor Pola Pangan Harapan
TUJUAN PD	Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan Indikator : Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan
SASARAN PD	Meningkatnya Produksi Perikanan Indikator : Persentase pertumbuhan produksi ikan

1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis agar supaya terdapat kejelasan dan sinergitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi anatar unit kerja internal Dinas dalam rangka pencapaian tujuan organisasi. Untuk proses bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara detil tersaji pada Dokumen Probis OPD sedangkan proses bisnis utama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tersaji sebagai berikut :

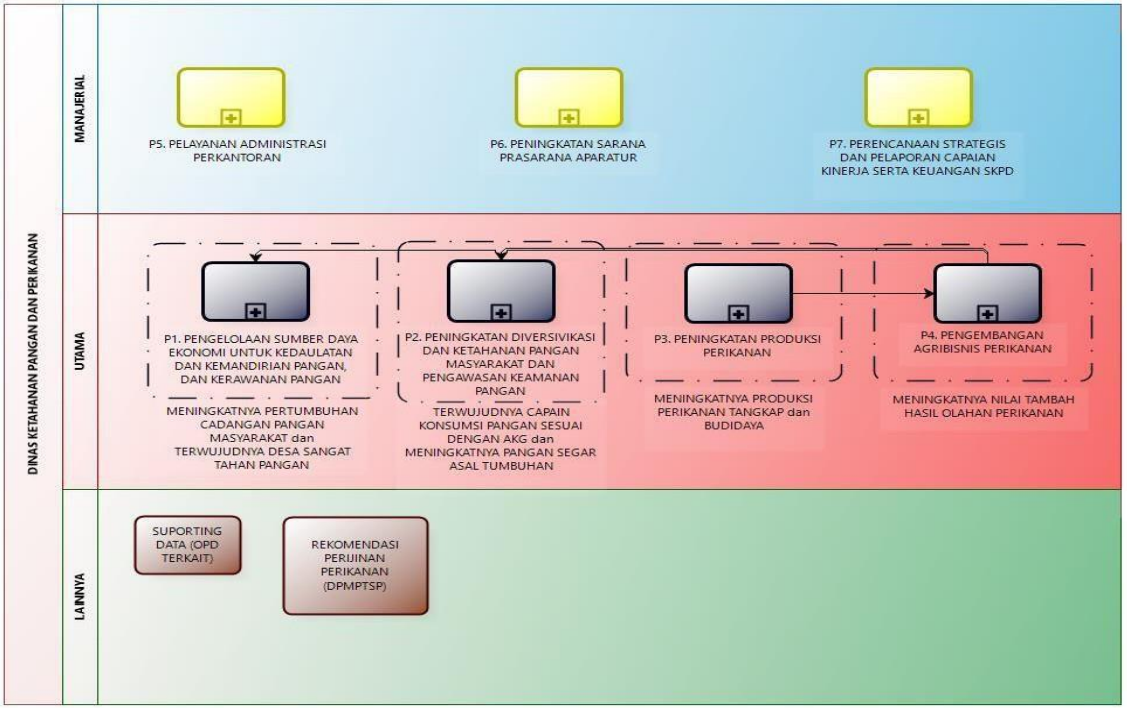

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

1.6.1 Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Berdasarkan Surat dari Inspektorat Nomor : X.700/522/415.15/2024 tanggal 16 Agustus 2024 perihal Laporan Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, nilai Akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Kabupaten Jombang Tahun 2024 adalah 80,37% dengan kategori A (Memuaskan) yaitu Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil dan pengukuran kinerja telah dilakukan pada seluruh jenjang. Nilai sebagaimana tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadapat seluruh komponen AKIP yang dipantau dengan formulasi perhitungan per komponen sebesar 80% nilai LKE dan 20% hasil evaluasi lapangan, adapun gambaran hasil evaluasi sebagai berikut :

a. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja;

   Evaluasi atas perencanaan kinerja dengan nilai 22,26 dari bobot 30% atau dengan capaian 80,86% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.

b. Evaluasi atas Pengukuran kinerja;

   Evaluasi atas pengukuran kinerja dengan nilai 23,29 dari bobot 30% atau dengan capaian 77,62% (B) yang berarti bahwa kualitas kinerja sebagian besar telah terpenuhi (>75% - 100%) sesuai mandat kebijakan.

c. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja;

   Evaluasi atas pelaporan kinerja dengan nilai 12,64 dari bobot 15% atau dengan capaian 84,29% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria yang telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.

d. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi.

   Evaluasi atas evaluasi akuntabilitas kinerja instansi dengan nilai 20,19 dari bobot 25% atau dengan capaian 80,75% (BB) yang berarti bahwa kualitas seluruh kriteria telah terpenuhi (100%) sesuai mandat kebijakan.

Dalam rangka meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, terdapat rekomendasi sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja

a. Dalam menetapkan target kinerja untuk periode selanjutnya agar

memperhatikan basis data atas capaian kinerja periode sebelumnya;

b. Melakukan monitoring atas target jangka menengah dalam rencana strategis sampai dengan level kegiatan dan sub kegiatan serta menindaklanjuti hasil monitoring dalam langkah nyata;

c. Meningkatkan pemahaman pegawai dengan melibatkan “secara aktif” seluruh pegawai baik secara bersamaan ataupun berjenjang dalam merumuskan perencanaan mulai dari identifikasi masalah, penentuan kinerja, indikator kinerja hingga penetapan target organisasi sampai dengan level paling operasional.

2. Pengukuran Kinerja

   a. Dalam melaksanakan pengukuran kinerja pegawai agar lebih memperhatikan keselarasan penyajian informasi kinerja antar dokumen.

3. Pelaporan Kinerja

   a. Meningkatkan kepedulian pegawai atas penyajian informasi kinerja dalam laporan kinerja dengan memberikan bimbingan secara berkelanjutan khususnya pada keselarasan penyajian informasi kinerja antara dokumen Laporan Kinerja dengan dokumen Pengukuran Kinerja Tribulan IV.

4. Evaluasi Akuntabilitas Internal

   a. Melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja dilingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan pendalaman yang lebih memadai yaitu dengan melihat dari kualitas dokumen.

1.6.1 Laporan Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi

Berdasarkan Surat dari Sekretaris Daerah Nomor : 000.8.6/9831/415.10/2024 tanggal 10 Desember 2024 perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, indeks Reformasi Birokrasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah 78,55 dengan kategori BB predikat “Sangat Baik”, adapun rincian hasil evaluasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut :

a. Kualitas rencana aksi masih belum optimal, beberapa rencana aksi hanya berfokus pada pemenuhan dokumen;

b. Kurang optimalnya proses monev internal dalam mengawal dan

memastikan kualitas perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan RB dalam rangka memaksimalkan capaian pembangunan RB;

c. Telah dibentuk Tim Kerja baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang namun dalam pengelolaannya masih belum memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN;

d. Telah melaksanakan pembangunan zona integritas namun belum secara keseluruhan pada 6 area perubahan dan berjalan minimal 1 tahun;

e. Nilai SPIP mengikuti nilai maturitas SPIP pemerintah kabupaten Jombang tahun 2023 yang dilakukan oleh BPKP;

f. Kualitas tindak lanjut aduan kurang baik dan kurang responsif, jawaban untuk pelapor masih bersifat normatif, pelapor kurang puas dengan pelayanan yang diberikan;

g. Untuk indikator persentase ketepatan perencanaan dengan realisasi pengadaan BMD, maka perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD pengadaan dan pemeliharaan harus selaras dengan riil aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah;

h. Untuk indikator ketepatan waktu penyampaian laporan bulanan BMD, maka harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu 10 bulan berikutnya.

i. Untuk indikator persentase capaian entry data pengadaan BMD dalam sistem informasi BMD per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.

j. Agar ditingkatkan nilai pada dimensi kompetensi pada Indeks Profesionalitas ASN

k. Telah dilaksanakan internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN melalui sosialisasi dan penggunaan media interaktif namun belum dilaksanakan secara intensif dan berkelanjutan

l. Untuk dapat ditingkatkan lagi perolehan Indeks Kepuasaan masyarakat.

Dalam rangka meningkatkan tata Kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, terdapat rekomendasi sebagai berikut :

a. Melaksanakan langkah-langkah peningkatan pemahaman dan penguatan komitmen pembangunan reformasi birokrasi seluruh pegawai khususnya tim pembangunan RB;

b. Meningkatkan kualitas pembangunan RB melalui perumusan rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasarkan permasalahan riil yang dihadapi serta mempertimbangkan hasil evaluasi ;

c. Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilakn catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi;

d. Segera menyesuaikan pengelolaan sistem kerja baru dengan memanfaatkan aplikasi e-kinerja BKN;

e. Terus melanjutkan proses pembangunan sona integritas dan melakukan penguatan dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi;

f. Meningkatkan pemahaman dan komitemen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, manajemen risiko hingga pemantauan pengendalian internal;

g. Monitoring secara berkala serta menindaklanjuti aduan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan, secara subtantif yang

disampaikan oleh masyarakat, perlu dilakukan perbaikan layanan;

h. Unit pengolah agar menyampaikan daftar arsip aktifnya kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan;
i. Pembuatan daftar arsip inaktif yang dipindahkan pada unit pengolah agar ditandatangani oleh pimpinan unit pengolah/unit kerja sebagai pihak yang memindahkan dan unit kearsipan sebagai pihak yang menerima;
j. Unit kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis;
k. Unit kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center;
l. Melanjutkan upaya internalisasi core values dan employer branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas;
m. Melakukan upaya perbaikan indeks kepuasaan masayarakat pada 3 unsur terendah.

1.7 Potensi dan Permasalahan

Potensi Kabupaten Jombang memiliki luas wilayah 1.109,63 km² (110.963 Ha), atau menempati sekitar 2,5% dari luas keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Jombang terdiri dari 21 kecamatan, 302 desa, 4 kelurahan, serta 1.258 dusun/lingkungan. Hampir seluruh wilayah Kabupaten Jombang termasuk dalam DAS Brantas (99,2%), dan hanya sebagian kecil saja yang masuk DAS Bengawan Solo (0,8%). Sungai-sungai utama yang melintasi wilayah Kabupaten Jombang antara lain, Sungai Brantas, Sungai Konto, Sungai Jarak, Sungai Pakel, dan Sungai Gunting. Kabupaten Jombang didominasi kawasan pertanian seluas 38.459,36 Ha (34,66%), kawasan hutan seluas 24.896 Ha (22,44%), kawasan perkebunan seluas 23.554 Ha (21,23%) serta kegiatan permukiman masih sebesar 19,95% atau seluas 22.142 Ha.

Pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga terwujudnya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab semua pihak

baik pemerintah maupun masyarakat, seperti tertuang dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2012 tentang pangan. Besarnya persediaan pangan satu daerah merupakan salah satu ukuran pangan yang dapat mencerminkan cukup tidaknya suplai pangan di daerah yang bersangkutan yang dapat mempengaruhi pola konsumsi masyarakat yang diukur dengan angka Pola Pangan Harapan (PPH) baik itu PPH konsumsi maupun PPH ketersediaan. Lancarnya system distribusi dan lembaga distribusi sangat menentukan ketersediaan pangan di suatu daerah. Salah satu upaya untuk meningkatkan ketahanan pangan masyarakat perlu dioptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai salah satu sumber pangan lokal terutama buah-buahan dan sayuran dengan program Kebun B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) mengingat kurang seimbangnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang yang masih tinggi dalam mengkonsumsi beras dan rendah untuk konsumsi protein hewani, sayur, buah-buahan dan umbi-umbian.

Potensi di bidang Perikanan Kabupaten Jombang memiliki panjang sungai 340,54 Km^2. Melihat dari potensi yang ada seperti diatas, maka potensi perikanan tangkap masih terdapat peluang untuk dikembangkan. Potensi perikanan lain yang ada di Kabupaten Jombang adalah Pengembangan budidaya perikanan air tawar juga masih sangat memungkinkan untuk dikembangkan mengingat luas potensi kawasan budidaya yang tersedia 70 Ha. Dari luas potensi kawasan yang tersedia baru termanfaatkan untuk usaha budidaya air tawar sebesar 60,7976 ha. Untuk restocking setiap tahun dilakukan penebaran di perairan umum. Peluang pasar produksi perikanan budidaya cukup besar karena masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya konsumsi ikan bagi kesehatan. Selain itu banyaknya tempat-tempat kuliner yang menyajikan menu ikan di Kabupaten Jombang juga menjadi salah satu peluang pemasaran hasil produksi ikan budidaya maupun tangkap.

Permasalahan dibidang pangan maupun perikanan yang masih dihadapi adalah :

- Regulasi untuk mendukung pelaksanaan urusan pangan di daerah belum optimal;

- Kurangnya volume cadangan pangan masayarakat yang dikelola oleh Kelompok Lumbung Pangan Masyarakat akibat kurangnya pemahaman kelompok LPM akan pentingnya CPM;
- Kurang beragamnya konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang akibat kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya mengkonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman;
- Belum optimalnya penanganan kemiskinan daerah/wilayah menyebabkan peningkatan jumlah RTM, sehingga menjadi salah satu aspek penyumbang desa rawan pangan;
- Keterbatasan SDM teknis dinas terkait penguasaan teknologi pemanfaatan lahan untuk kegiatan Kebun B2SA (metode hidroponik, airoponik dll);
- Dokumen Neraca Bahan Makanan (NBM), Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG), *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA), Neraca Pangan Strategis (NPS) maupun dokumen PPH belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam menentukan kebijakan terkait urusan pangan;
- Masih terdapat cemaran pada pangan segar asal tumbuhan baik kimia maupun mikroba;
- Belum optimalnya pemanfaatan potensi perikanan yang ada.
  Masih memungkinkan pengembangan perikanan budidaya dengan sistem budidaya di lahan sempit menggunakan kolam terpal sedangkan pengembangan perikanan tangkap dengan mengintensifkan penangkapan di PUD dengan menambah jumlah sarana dan prasarana penangkapan;
- Masih rendahnya angka konsumsi ikan masyarakat di Kabupaten Jombang jika dibanding Angka Konsumsi Ikan Provinsi Jawa Timur maupun Nasional;
- Keterbatasan jumlah pengolah hasil perikanan di Kabupaten Jombang;
- Permasalahan harga pakan ikan pabrikan yang masih menjadi kendala pada pembudidaya;
- Belum optimalnya kinerja UPT Budidaya Perikanan Air Tawar;

- Masih adanya pembudidaya ikan yang menggunakan antibiotik dalam kegiatan usaha budidaya ikan;

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang sebagai bentuk penjabaran dari RPD Pemerintah Kabupaten Jombang disusun dengan berpijak pada sasaran, indikator dan program pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Sebagai langkah perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu maka Renstra juga memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang mungkin timbul, guna mendukung pencapaian ***prioritas dan target pembangunan*** dalam RPD.

Telaahan terhadap prioritas dan target pembangunan Daerah tersebut memberikan gambaran bagi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sesuai tugas dan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pembangunan daerah dibidang pangan dan perikanan secara profesional, transparan dan akuntabel. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan secara langsung mendukung Tujuan dan Sasaran Pemerintah Daerah yaitu **Tujuan ke-4** yaitu "***Meningkatkan Daya Saing dan Pemerataan Ekonomi melalui Pemantapan Kualitas Infrastruktur Berkelanjutan yang Mendorong Pengembangan Agrobisnis dan Sektor Unggul Lainnya***" dengan **Sasaran ke-1** yaitu " ***Meningkatnya PDRB Sektor Unggulan dan Investasi Daerah***". Untuk dapat mewujudkan Tujuan dan Sasaran Pembangunan tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berpartisipasi aktif dalam mengembangkan sektor pangan, perikanan, untuk mendorong pengentasan kemiskinan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berdaya saing dengan tetap mempertahankan karakteristik kearifan lokal masyarakat Kabupaten Jombang. Dengan demikian Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menjabarkan melalui rumusan ***Tujuan*** di dalam Perencanaan Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 mengacu dengan sasaran RPD

Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah :

1. **Meningkatkan Jumlah, Kualitas dan Akses Pangan Masyarakat**
2. **Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan**
3. **Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokrasi**

Telaahan dalam pencapaian keberhasilan Tujuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. Persentase pertumbuhan konsumsi pangan
2. Pertumbuhan PDRB Sektor Perikanan
3. Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)

Sedangkan ***Sasaran*** di dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024-2026 adalah :

1. Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatnya Produksi Perikanan
3. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah

Untuk menilai keberhasilan pencapaian sasaran ini dapat diukur dengan indikator sebagai berikut:

1. *Skor Pola Pangan Harapan (PPH)*
2. *Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan*
3. *Nilai Evaluasi AKIP OPD*

Berikut ini adalah rencana kinerja pelayanan jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang dalam Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel. 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Tujuan/Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tujuan 1: Meningkatkan jumlah, kualitas dan akses pangan Masyarakat	Persentase Pertumbuhan Konsumsi Pangan	NA	0,87	0,88	0,90	1,2
Sasaran 1: Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	NA	83,92	84,65	85,39	91,86

Tujuan 2 : Meningkatkan PDRB Sektor Perikanan	Pertumbuhan PDRB Sektor	NA	5,96	6,01	6.05	2,85
Sasaran 2 : Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	NA	0,17	0,18	0,19	0,20
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja birokarsi	Indeks Reformasi Birokrasi	NA	66	73,39	76	69
Sasaran 3 : Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	NA	BB (76,79)	BB (78,29)	BB (79)	A(82,96)

2.2 Perjanjian Kinerja

Penyusunan Perjanjian Kinerja merupakan salah satu tahapan dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang termuat dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 dan PERMENPAN No. 53 Tahun 2014. Perjanjian Kinerja merupakan lembar/ dokumen yang berisikan penugasan dari Bupati sebagai pemberi amanah kepada pimpinan Organisasi Perangkat Daerah sebagai penerima amanah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Tujuan penyusunan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujud komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar dalam pelaksanaan evaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagai dasar pemberian *reward* and *punishment*.
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan / kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten

Jombang telah menyusun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas serta menyusun matriks pembagian peran dan hasil mulai sekretaris, kepala bidang sampai dengan pelaksana. Perjanjian Kinerja tahun 2024 antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati Jombang terdiri dari 3 (tiga) sasaran strategis yang didukung melalui 8 (delapan) program tersaji pada Table 2.2, sebagai berikut :

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,86
2.	Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	0,20 %
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai Evaluasi AKIP OPD	A (82,96)
NO	**SASARAN PROGRAM**	**INDIKATOR KINERJA**	**TARGET**
1.	Meningkatnya capaian kinerja aparatur	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%
2.	Meningkatnya pertumbuhan cadangan pangan masyarakat	Persentase cadangan pangan masyarakat	0,85%
3.	Terwujudnya capaian konsumsi pangan sesuai AKG	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	100% Energi 100% Protein
4.	Terwujudnya desa sangat tahan pangan	Persentase Desa rentan rawan pangan	0%
5.	Meningkatnya pangan segar asal tumbuhan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	98,50%
6.	Meningkatnya produksi perikanan tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	0,14%
7.	Meningkatnya produksi perikanan budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0,20%

8.	Meningkatnya nilai tambah hasil olahan Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp. 1.675.123.832,92

Dilaksanakan melalui dukungan Program dan Anggaran sebagai berikut :

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program penunjang urusan pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Rp.5.577.883.227,-
2.	Program pengelolaan sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rp.1.687.705.544,-
3.	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Rp.951.415.850,-
4.	Program penanganan kerawanan pangan	Rp.167.658.200,-
5.	Program pengawasan keamanan pangan	Rp.79.000.000,-
6.	Program pengelolaan perikanan tangkap	Rp.80.395.700,-
7.	Program pengelolaan perikanan budidaya	Rp.701.044.433,-
8.	Program pengolahan dan pemasaran hasil Perikanan	Rp.342.862.200,-

2.3 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang yang telah ditetapkan, telah dituangkan dalam Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dengan Bupati Jombang. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)

NO	IKU	FORMULA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Skor Pola Pangan Harapan	Skor Pola Pangan Harapan Pada tahun n	Dokumen Analisis Situasi Konsumsi Pangan Berbasis Pola Pangan Harapan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
2.	Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan	$\frac{\text{(Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n – Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n-1)}}{\text{Jumlah Produksi Ikan TB Thn.n-1}}$ X 100 %	Dokumen Data dan Informasi Perikanan Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan
3.	Nilai Evaluasi AKIP OPD	Nilai AKIP Tahun n	Nilai Evaluasi SAKIP OPD Tahun-n	Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan program kegiatan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang merupakan instansi pemerintah yang menjadi bagian dari Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Jombang yang memiliki tugas mengelola 2 (dua) urusan yaitu bidang pangan dan perikanan di Kabupaten Jombang. Dalam memberikan laporan pertangungjawaban atas tugas yang diberikan, diwajibkan untuk membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan.

LKjIP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Dinas yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode/ tahun tertentu. Tujuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasayarat untuk terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan dan akuntabel. Dengan demikian setiap instansi pemerintah memiliki kewajiban dalam memberikan pertanggungjawaban secara jelas dan terukur atas

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja organisasi merupakan hasil pengukuran kinerja indikator kinerja utama dari sasaran strategis dan capaian target dari masing-masing indikator kinerja. Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024 berdasarkan sasaran strategis yang hendak dicapai dapat dijelaskan melalui tabel berikut :

3.1.1 Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Tabel 3.1.1
Pencapaian Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	**Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat**	**Skor Pola Pangan Harapan**	**91,86**	**90,5**	**98,52%**
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	0,85%	0,86%	101,18%
	Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	100% Energi dan 100% Protein	96% Energi dan 106,8% Protein	101%
	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase Daerah rentan rawan pangan	0%	0%	100%
	Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Pangan	98,5%	100%	101,52%

No	Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
2	**Meningkatnya Produksi Perikanan**	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**0,20%**	**0,20%**	**100%**
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan produksi ikan tangkap	0,14%	0,13%	92,86%
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pertumbuhan produksi ikan budidaya	0,20%	0,20%	100%
	Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp 1.675.123.832,92	Rp. 1.782.694.477,14	106,42%
3	**Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah**	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A (82,96)**	**A(80,37)**	**96,88%**
	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk Nilai Kinerja Organisasi, berdasarkan Permenpan RB Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi pada tahun 2024 tergolong dalam predikat **BAIK** dengan nilai kinerja organisasi sebesar 98,47%. Interpretasi Predikat Kinerja Organisasi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, memiliki tingkat implementasi manajemen kinerja dan capaian kinerja sudah sangat baik dan sesuai ekspektasi. Walaupun dari tiga (3) sasaran strategis yang dimiliki hanya pada sasaran strategis dua memiliki capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditentukan. Untuk sasaran strategis satu dan tiga memiliki capaian kinerja 98,52% dan 96,88%. Perlu adanya upaya peningkatan untuk dapat mencapai realisasi sesuai dengan target yang ditentukan.

Sasaran strategis pertama, yaitu indikator skor pola pangan harapan konsumsi, belum dapat mencapai target capaian kinerja yang telah ditentukan, akan tetapi sudah beragam secara kualitas. Walaupun secara kuantitas belum cukup, dalam keragaman konsumsi setiap jenis kelompok pangan belum optimal sesuai

dengan anjuran pola pangan harapan, terutama kelompok pangan umbi-umbian, sayur dan buah, buah/biji berminyak serta pangan hewani. Sehingga perlu peningkatan program/kegiatan publikasi penganekaragaman konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang dan aman, terutama pada jenis kelompok pangan yang belum tercapai pada skor maksimal; edukasi konsumsi yang beragam, bergizi, seimbang dan aman.

Adapun penjelasan detail terkait capaian sasaran sebagai berikut :

Sasaran 1, Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan dimana target skor PPH sebesar 91,86 terealisasi sebesar 90,5 atau mencapai 98,52 %. **Pola Pangan Harapan** merupakan keragaman dan keseimbangan konsumsi **pangan** pada tingkat keluarga akan menentukan kualitas konsumsi pada tingkat wilayah, baik kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Artinya kualitas konsumsi **pangan** penduduk ditingkat wilayah (makro) ini dicerminkan dengan **skor Pola Pangan Harapan** (PPH). Dalam Undang-Undang No 18 tahun 2012 disebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur melalui pencapaian nilai, komposisi, pola pangan dan gizi seimbang, dengan indikator yang ada saat ini adalah Pola Pangan Harapan (PPH). Terkait dengan hal tersebut,pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) merupakan indikator kunci yang perlu diukur dan dianalisis secara periodik, baik ditingkat pusat dan di daerah, sesuai dengan amanat UU No 18 Tahun 2012 tersebut.

Dari hasil survey konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan yang dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 dapat dijelaskan bahwa Skor PPH memiliki realisasi cukup baik walaupun belum mencapai target yang ditentukan. Skor pola pangan harapan konsumsi sebesar 90,5 memiliki artinya bahwa kualitas konsumsi masyarakat Kabupaten Jombang dilihat dari keragaman konsumsi sudah beragam. Skor Pola Pangan Harapan konsumsi >90 tergolong dalam predikat keragaman BAIK. Akan tetapi konsumsi pangan masyarakat Jombang secara kuantitas belum cukup namun secara kualitas sudah beragam. Hal ini dapat disebabkan tingkat keberagaman belum dapat dikatakan ideal maupun seimbang jika konsumsi dari 9 (sembilan) kelompok pangan belum sesuai dengan anjuran

konsumsi pola pangan harapan. Berdasarkan hasil survey konsumsi pangan, untuk kelompok pangan yang memiliki konsumsi cukup adalah padi-padian, kacang-kacangan serta minyak dan lemak. Sementara untuk kelompok pangan lain seperti umbi-umbian, pangan hewani, buah/biji berminyak, gula, serta sayur dan buah masih kurang konsumsinya. Adapun jenis pangan yang banyak dikonsumsi per kelompok pangan adalah beras, singkong, ikan, minyak kelapa sawit, kelapa, kacang kedelai, gula pasir dan sayuran.

Angka konsumsi energi tahun 2024 sebesar 2.016 kkal/kap/hari (96% AKE) dan angka konsumsi protein sebesar 60,9 gr/Kap/hari (106,8% AKP). Hal ini menunjukkan bahawa secara kuantitas konsumsi energi belum cukup namun sudah diatas 95%, sementara untuk kuantitas konsumsi protein sudah melebihi anjuran yang direkomendasikan (>100%). Tingkat konsumsi pangan berdasarkan skor PPH, yang menyumbangkan energi terbesar adalah kelompok padi - padian 1.076 kkal/kap/hr (51,2% dari total angka konsumsi energi) artinya masyakarat jombang dalam pemilihan pangan pokok masih bergantung pada kelompok jenis padi- padian, sedangkan konsumsi umbi- umbian hanya menyumbang 26 kkal/kap/hr (1,2% dari total konsumsi energi). Hal ini menunjukkan diversifikasi pangan masyarakat Kabupaten Jombang belum beragam, masih dominan pada beras dan salah satu umbi. Untuk sayur/buah tingkat konsumsinya masih kurang dari ideal, menyumbang 105 kkal/kap/hr (5% dari total konsumsi energi). Sedangkan untuk pangan hewani menyumbang 243 kkal/kap/hr (11,6% dari total konsumsi energi), dengan sumbangan energi terbesar adalah dari daging unggas (28%), ikan (26,8%), dan susu (21,9%). Kuantitas konsumsi di masing-masing kecamatan, yang dilihat dari rata-rata asupan per kapita per hari dan tingkat kecukupan energi dan protein, meskipun bervariasi, namun di semua kecamatan sudah lebih dari 80% AKE dan AKP, menunjukkan kuantitas yang sudah cukup baik.Rata-rataasupanenergiterendah di Kecamatan Jombang, sebesar 1.888 Kkal/kapita/hari atau memenuhi 89,9% AKE, sedangkan tertinggi di Kecamatan Kesamben, sebesar 2.272 Kkal/kapita/hari atau memenuhi 108,2% AKE. Sementara protein, di antara 21 Kecamatan, lebih dari 75%-nya mencapai lebih dari 100% AKP. Rata-rata asupan protein terendah di Kecamatan Wonosalam, sebesar55,0gram/kapita/hari atau memenuhi 96,5% AKP, sedangkan tertinggi di Kecamatan Kesamben sebesar 82,7 Gram/kapita/hari atau memenuhi 145,2%

AKP. Sedangkan secara kualitas konsumsi, apabila dilihat dari skor PPH per kecamatan, sebagian besar kualitas konsumsinya sudah baik, dengan skor lebih dari 90, namun masih terdapat 4 kecamatan dengan skor kurang dari 80, yaitu Kecamatan Mojoagung, Kecamatan Wonosalam, Kecamatan Bareng dan Kecamatan Plandaan. Perlu adanya upaya strategi untuk mencapai konsumsi yang ideal sebagai berikut :

1. Menambah konsumsi umbi-umbian terutama singkong;
2. Peningkatan skala usaha produk olahan singkong dan umbi-umbi lainnya;
3. Kampanye dan edukasi konsumsi Beragam, Bergizi, Seimbang,dan Aman harus terus dilakukan secara berkelanjutan;
4. Menambah konsumsi pangan hewani, khususnya telur, ikan dan hasil olahan perikanan;
5. Peningkatan festival gerakan memasyarakatkan makan ikan;
6. Peningkatan konsumsi sayur dan buah terutama buah musiman dan buah hasil produksi domestik;
7. Kampanye edukasi gizi di berbagai kalangan.

Berdasarkan hasil analisa tersebut, masyarakat masih mengandalkan beras sebagai bahan pangan pokok, belum beralih mengkonsumsi bahan pangan pokok lainnya, seperti umbi-umbian. Sehingga perlu adanya gerakan percepatan diversifikasi pangan dan penganekaragaman konsumsi pangan, akan masyarakat kabupaten Jombang mengkonsumsi bahan pangan sesuai dengan kaidah pola pangan harapan yang ideal agar terwujud masyarakat kabupaten Jombang yang sehat, produktif dan berdaya saing. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi keberagaman konsumsi dimasyarakat, antara lain :

- Tingkat Rerata Pengeluaran Rumah Tangga
  Keuarga dengan tingkat pengeluaran rumah tangga lebih akan lebih banyak kesempatan untuk mengkonsumi beragam jenis bahan pangan.
- Tingkat Pendidikan
  Tingkat pendidikan formal masyarakat akan berpengaruh pada tingkat konsumsi pangan yang beragam, bergizi, berimbang dan aman. Semakin tinggi pendidikan formal kepala keluarga memiliki tingkat kecukupan energi dan protein >80%

Sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dapat terlaksana karena didukung 4 program antara lain : Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan memiliki capaian kinerja sebesar 101,18%; Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat memiliki capaian kinerja sebesar 101% dan 114,7%; Program Penanganan Kerawanan Pangan memiliki capaian kinerja sebesar 100%; serta Program Pengawasan Keamanan Pangan memiliki capaian kinerja sebesar 101,52%. Dari keempat program yang mendukung sasaran ini, secara umum capaian pada indikator program tergolong baik, dengan capaian rata-rata sebesar 100,93%.

Sasaran 2, Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan dengan target 0,20% terealisasi sebesar 0,20 % atau mencapai 100%. Pertumbuhan produksi ikan terealisasi sesuai target, hal ini disebabkan oleh beberapa factor antara lain yaitu penurunan kualitas perairan akibat adanya limbah industri maupun limbah rumah tangga sehingga mengakibatkan banyak kendala penyakit dan kematian terutama menyerang pada ikan yang masih benih, di perairan umum darat; masih adanya aktivitas penangkapan ikan secara destructive di perairan umum darat, seperti kegiatan penangkapan ikan dengan cara menggunakan setrum, racun dll. Relatif masih rendahnya kelembagaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas) perairan serta rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kelestarsian dan keberlanjutan ekosistem perairan umum darat. Sedangkan untuk produksi perikanan budidaya masih ada pembudidaya ikan yang belum menerapkan CBIB maupaun CPIB dalam kegiatan usahanya, kepemilikan sarana prasarana budidaya perikanan yang belum optimal serta tingginya biaya produksi budidaya terkait kebutuhan pakan pabrikan sehingga petani banyak yang memanfaatkan pakan tambahan/pakan alternatif yang mempengaruhi waktu lamanya proses budidaya serta tingginya kemungkinan kejadian penyakit ikan. Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target diatas diantaranya adanya fasilitasi hibah sarana perikanan bagi pembudidaya, pembenih maupun nelayan untuk mengembangkan kegiatan usaha perikanan budidaya dan perikanan tangkap perairan umum darat (PUD) yang dilakukan serta bimbingan teknis/ pelatihan teknis budidaya yang CBIB, perbenihan ikan yang CPIB dan hama penyakit ikan dalam rangka peningkatan pengetahuan pembudidaya, selain itu sekaligus

upaya peningkatan minat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha perikanan. Pada tahun 2024 jumlah pembudidaya ikan sebanyak 2.354 orang, jumlah pembenih atau Unit Pembenihan Rakyat (UPR) sebanyak 245 unit, jumlah nelayan 572 orang, KUB nelayan (Kelompok Usaha Bersama) sebanyak 20 kelompok, 178 kelompok pembudidaya ikan serta 1 2 kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan serta 4 IKM yang bergerak dibidang usaha pengolahan ikan. Adanya pembudidaya, nelayan, pembenih sampai dengan poklahsar merupakan faktor pendorong keberhasilan peningkatan produksi ikan maupun pendukung peningkatan angka konsumsi ikan di Kabupaten Jombang. Khususnya untuk peningkatan pelayanan terkait Kesehatan ikan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki Inovasi Layanan secara online untuk memudahkan pembudidaya dalam pengaduan kejadian penyakit ikan,melalui Aplikasi Si Patin Ceria diharapkan dengan aplikasi si patin ceria dapat meminimalisir resiko kegagalan panen yang diakibatkan adanya kejadian penyakit ikan serta meningkatkan fasilitasi promosi kelompok olahan produk hasil perikanan. Selaku pembina teknis, terus berupaya melakukan pembinaan dan pengembangan pelatihan/bimtek terkait budidaya, perbenihan, hama penyakit, pengelolaan sumberdaya perairan serta pengolahan hasil perikanan juga memberikan fasilitasi hibah sarana prasarana perikanan baik budidaya, tangkap maupun perbenihan. Selain pembudidaya, dalam rangka pengembangan sektor perikanan, dilakukan kolaborasi kegiatan budidaya perikanan pada lokus Desa Mandiri Pangan pada Desa Made Kecamatan Kudu, Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam. Untuk memfasilitasi pemasaran produk-produk olahan hasil perikanan, telah memfasilitasi pemasaran produk olahan perikanan produksi poklahsar pada event GpiJ, Jombang fest, setiap gerakan pangan murah serta mengoptimalkan Pojok Display di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, harapannya adalah melalui promosi sederhana tetap dapat memberikan semangat bagi para poklahsar untuk terus berproduksi secara rutin. Sasaran strategis kedua (2) yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan didukung oleh 3 program antara lain : Program Pengelolaan Perikanan Tangkap memiliki capaian kinerja sebesar 102,30%; Program Pengelolaan Perikanan Budidaya memiliki capaian kinerja sebesar 97,89% dan 90,88% serta Program Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki capaian kinerja sebesar

120%. Capaian ketiga program pengampu sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya produksi perikanan memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 102,76%, capaian kinerja program tergolong baik walaupun ada dua (2) indikator program yang belum mencapai target kinerja yang telah ditentukan.

Sasaran 3, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dengan target nilai SAKIP OPD "A" terealisasi "A" dengan score 80,37 kategori "Memuaskan", penilaian tersebut meliputi :

- Perencanaan kinerja, dengan hasil evaluasi sebesar 24,26 %
- Pengukuran kinerja, dengan hasil evaluasi sebesar 23,29 %
- Pelaporan kinerja, dengan hasil evaluasi sebesar 12,64 %
- Evaluasi kinerja, dengan hasil evaluasi sebesar 20,19 %

Dari hasil penilaian tersebut menggambarkan bahwa implementasi SAKIP sudah diterapkan di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang. Meskipun demikian masih perlu peningkatan kinerja karena dari hasil penilaian terdapat catatan-catatan yang masih perlu diperbaiki diantaranya adalah masih perlu ditingkatkan dalam proses perencanaan kinerja, dengan melakukan monitoring target jangka menengah serta tindak lanjut dalam langkah nyata. Aspek pengukuran kinerja, perlu adanya pencermatan keselarasan dokumen pengukuran kinerja dan laporan kerja tahunan pegawai. Aspek evaluasi akuntabilitas kinerja instnasi perlu adanya perhatian dalam keselarasan antar dokumen evaluasi implementasi akuntabilitas kinerja. Selain itu berdasarkan hasil evaluasi lapangan, perlu adanya internalisasi pemahaman perencanaan kinerja organisasi dan individu. Sasaran strategis ketiga (3) yaitu Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah diampu oleh Program Penujang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan capaian sebesar 100%. Capaian kinerja program pengampu sasaran strategis ketiga (3) ini telah mencapai target yang telah ditentukan.

3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) terakhir

Tabel 3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi			
			Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**91,86**	**85,06**	**87,43**	**90,18**	**90,5**
Program Pengelolaan Sumber daya Ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	0,85%	-	0,6%	0,74%	0,86%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	100% Energi dan 100% Protein	85,93% Energi dan 101,75%	99,24 % Energi dan 103,25 %	99,25 % Energi dan 114,7% Protein	96% Energi dan 106,8% Protein
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	0%	-	0,33%	0,33%	0%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	98,5%	96,67 %	98,33%	98,33%	100%

Sasaran Strategis - Program	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**			
			Tahun 2021	**Tahun 2022**	**Tahun 2023**	**Tahun 2024**
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**0,20%**	**0,17%**	**0,18%**	**0,186%**	**0,20%**
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap	0,14%	0,13%	0,13%	0,133%	0,13%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0,20%	0,17%	0,18%	0,186%	0,20%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp 1.675.123.832,92	Rp 1.195.868.500	Rp 1.077.162.555	Rp 1.545.306.878	Rp. 1.782.694.477,14

Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A (82,96)**	**BB (76,37)**	**A (80,69)**	**A (81,82)**	**A(80,37)**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian Kinerja Aparatur	100%	100%	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dilihat capaian pada masing masing sasaran yang telah ditetapkan dengan membandingkan antara realisasi kinerja tahun ini dengan 2 (dua) tahun terakhir sebagai berikut:

Sasaran 1, Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2022 Skor PPH mencapai 87,43 sedangkan pada tahun 2023 Skor PPH mengalami peningkatan yaitu 90,18 atau meningkat sebesar 3,14% dan pada tahun 2024 Skor PPH mencapai 90,5 terjadi peningkatan sebesar 0,35%. Peningkatan skor PPH tersebut seiring pemulihan kondisi perekonomian dunia, nasional dan daerah. Dukungan kebijakan pemerintah terkait pemulihan ekonomi pada tahun 2024 yang mampu memberikan dampak positif terhadap kondisi ekonomi masyarakat, diantaranya banyaknya bantuan pangan yang disalurkan ke masyarakat.

Sedangkan upaya yang telah dilakukan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan dalam mewujudkan sasaran “Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat” antara lain adalah melalui pembinaan pemanfaatan kebun B2SA dalam rangka mendukung ketahanan pangan keluarga, pembinaan penganekaragaman pangan terutama pangan lokal, pengembangan desa mandiri pangan (Desa Made, Kec Kudu, Desa Wonosalam Kec Wonosalam), pengadaan beras Cadangan pangan pemerintah daerah, kegiatan penyisihan cadangan pangan Masyarakat di kelompok lumbung pangan masyarakat sebagai salah satu upaya untuk pemberdayaan masyarakat dan perlindungan masyarakat dari kerawanan pangan misalnya pada saat terjadi bencana/wabah. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan melaksanakan Gerakan Pangan Murah untuk antisipasi gejolak harga pangan serta untuk mewujudkan keterjaminan atas ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat, Dalam rangka menuju Skor PPH

yang ideal dimana pola konsumsi masyarakat sudah mulai beragam, bergizi, seimbang dan aman maka program-program yang mendukung aspek ketersediaan pangan, akses pangan, stabilitas pangan baik distribusi maupun harga pangan, keamanan pangan sampai dengan pangan tersebut mampu dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik akan terus dilakukan oleh dinas. Sehingga dapat meningkatkan tingkat pendapatan masyarakat, dengan demikian daya beli masyarakat meningkat, akses pemenuhan kebutuhan pangan tidak mengalami kendala. Skor PPH diampu oleh empat (4) program yaitu Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, Program Penanganan Kerawanan Pangan dan Program Pengawasan Keamanan Pangan. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat memiliki indikator : persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG. Indikator kinerja pada program ini, antara lain : persentase angka konsumsi pangan (energi dan protein). Capaian kinerja program untuk masing-masing indikator sebagai berikut, Angka konsumsi

pangan (energi), memiliki capaian sebesar 96%; dan angka konsumsi pangan (protein) sebesar 106,8%. Program pengawasan keamanan pangan memiliki indikator kinerja yaitu persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan kemanan pangan. Adapun capaian kinerja program sebesar 100%, tidak ditemukan sampel pangan segar yang terdeteksi mengandung cemaran. Program penanganan kerawanan pangan memiliki indikator kinerja antara lain : persentase daerah rentan rawan pangan, adapun capaian indikator program sebesar 100%. Berdasarkan hasil analisa dokumen *Food Security and Vulnerability Atlas* tahun 2024 di Kabupaten Jombang tidak terdapat desa rawan pangan dengan piroritas 1. Dan Program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, dengan indikator kinerja persentase cadangan pangan masyarakat memiliki capaian sebesar 101,18%.

Sasaran 2, Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produksi ikan, pada tahun 2022 terealisasi

sebesar 0,18%, tahun 2023 sebesar 0,186% dan tahun 2024 sebesar 0,20%. Jika dibandingkan dengan 2 (dua) tahun terakhir pertumbuhan produksi ikan mengalami peningkatan, hal ini merupakan dampak dari program pemerintah dalam rangka upaya pemulihan ekonomi, melalui kegiatan-kegiatan fasilitasi hibah sarana usaha perikanan, kegiatan pelatihan teknis maupun pengolahan akan dapat mendorong peningkatan produksi perikanan serta terjadi peningkatan jumlah pembudidaya ikan pada tahun 2024. Produksi perikanan budidaya pada tahun 2024 sebesar 14.760,20 ton, yang terdiri dari komoditi ikan lele, gurami, patin, nila, mas dan bawal.

Adapun produksi budidaya per jenis ikan (komoditi) adalah sebagai berikut :

No	Komoditi Ikan	Produksi (ton)	Nilai Produksi (Rp)
1.	Lele	6.768,5	94.723.438.200
2.	Gurami	405,7	7.870.226.000
3.	Patin	1.913,1	24.307.815.000
4.	Nila	224,9	3.312.020.000
5.	Mas	226,9	3.338.020.000
6.	Bawal	5.221,1	58.567.515.000
	Jumlah	14.760,20	192.119.034.200

Sedangkan produksi ikan tangkap mencapai 151,20 Ton. Adapun jenis ikan yang ada di Perairan Umum Daratan (PUD) yang ditangkap oleh nelayan antara lain gabus (22 ton), mas (18,20 ton), lele (13 ton), tawes (24,7 ton), mujair (34,6 ton), patin jambal (20,7 ton) dan wader (18 ton). Peningkatan produksi ikan budidaya juga turut didukung oleh ketersediaan benih di kabupaten. Pada tahun 2024, produksi benih ikan mencapai 292.178.200 Ekor. Benih dihasilkan oleh unit-unit pembenihan rakyat (UPR) dan UPT Budidaya Perikanan Air Tawar. Kegiatan perbenihan baik di UPR maupun di UPT masih sangat perlu ditingkatkan terutama terkait ketersediaan induk unggul yang menjadi salah satu kebutuhan utama dalam menghasilkan benih ikan. Salah satu upaya meningkatkan ketertarikan masyarakat dengan bidang perikanan, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

melalui UPT Budidaya Perikanan Air Tawar mengembangan inovasi program edukasi wisata perikanan, SAMBANG BUDIMAN (Strategi Pengembangan Budidaya Ikan Menuju Mandiri Pangan). Inovasi ini diharapkan dapat meningkatkan minat pelajar dan masyarakat untuk pengembangan bidang perikanan. Sehingga ke depan, dapat bermunculan pembudidaya – pembudidaya milenial yang berkontribusi untuk pengembangan sektor perikanan di Kabupaten Jombang. Selain peningkatan produksi hasil perikanan perlu adanya dukungan terkait pengolahan hasil perikanan, salah satunya adalah melalui pelatihan olahan hasil perikanan, diharapkan akan dapat mendorong tumbuhnya poklahsar-poklahsar lebih banyak lagi yang memanfaatkan hasil produksi ikan pembudidaya ikan lokal kabupaten.

Sasaran 3, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2024 terus mengalami peningkatan nilai SAKIP. Artinya seluruh SDM aparatur dinas sudah semakin menyadari akan pentingnya peningkatan kualitas kinerja. Rekomendasi-rekomendasi yang diberikan oleh Tim SAKIP selalu menjadi acuan bagi dinas dalam memperbaiki kualitas kinerja setiap tahun. Akan tetapi masih perlu upaya lebih baik lagi, antara lain adalah memberikan pemahaman kepada seluruh aparatur Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tentang indikator-indikator yang sudah ditergetkan serta memahami rencana aksi yang telah dibuat dan mampu melakukan monitoring atas rencana aksi yang telah dilakukan serta tindak lanjut yang dibutuhkan. Setiap aparatur harus memiliki integritas dan tanggung jawab yang tinggi dengan demikian keberadaannya dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap kemajuan dinas untuk menjalankan tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Jombang di bidang pangan dan bidang perikanan.

3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.1.3 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**90,02**	**90,5**	**100,33%**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Presentase Cadangan Pangan Masyarakat	1,15%	0,86%	74,78%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPJMD/ReNstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	90,52% Energi dan 100% Protein	96% Energi dan 106,8% Protein	106,43%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan Pangan	0%	0%	100%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Pangan	99,21%	100%	100,80%
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**0,22%**	**0,20%**	**90,91%**
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan produksi ikan tangkap	0,16%	0,13%	81,25%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0,22%	0,20%	90,91%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp 1.373.432.433	Rp. 1.782.694.477,14	129,80%
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A (83,12)**	**A(80,37)**	**96,69%**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	100%	100%

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2024 hanya ada satu sasaran strategis telah mencapai target periode akhir renstra dan dua sasaran strategis mendekati target periode akhir renstra, sehingga perlu peningkatan kinerja dari masing-masing program yang mampu mewujudkan tercapainya sasaran yang telah ditetapkan. **Sasaran strategis pertama (1)**, yaitu Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator kinerja : Skor Pola Pangan Harapan. Capaian pada sasaran strategis dengan indikator "Skor Pola Pangan Harapan" realisasi skor PPH Konsumsi tercapai 90,5 dari target 90,02 akhir renstra, capaian sebesar 100,33%, capaian pada tahun 2024 telah mencapai target akhir renstra yang telah ditentukan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Sumberdaya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan

Sasaran strategis ini dicapai melalui Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator Persentase Cadangan Pangan. Program ini memiliki intervensi kegiatan dalam mendukung target indikator kinerja yang telah dilakukan antara lain : fasilitasi penyediaan infrastruktur pendukung kemandirian pangan berupa pengadaan CPPD (cadangan pangan pemerintah daerah); hibah isi lumbung pangan sebanyak 12 kelompok; *rice milling unit* (RMU) sebanyak 1 unit serta timbangan duduk sebanyak 3 unit. Program ini memiliki realisasi kinerja program yang telah melebihi dari target yang telah ditentukan, sebesar 101,18%. Program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat, dengan indikator kinerja : Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG. Program ini memiliki intervensi kegiatan dalam mendukung target indikator kinerja yang telah dilakukan antara lain : penyediaan data informasi harga pangan dan neraca bahan

makanan; penyediaan data stok dan pasokan pangan; pengembangan pemberdayaan masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumberdaya lokal. Untuk meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat Kabupaten Jombang. Program ini memiliki realisasi kinerja program yang telah melebihi dari target yang telah ditentukan, sebesar 101%. Program penanganan kerawanan pangan, dengan indikator kinerja persentase daerah rentan rawan pangan dengan realisasi kinerja sebesar 100%. Intervensi program ini dalam pencapaian target sasaran strategis satu (1) antara lain pemutakhiran peta ketahanan dan kerentanan pangan serta penanganan kerawanan pangan kabupaten. Program ini menghasilkan analisa data kerawanan pangan yang dapat digunakan sebagai acuan pengambilan kebijakan program pembangunan yang akan dilakukan oleh pejabat pengambil kebijakan. Program pengawasan keamanan pangan dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Program ini memfasilitasi pengadaan sarana dan prasarana pengujian mutu dan keamanan pangan segar, yang digunakan sebagai indikator pengukuran tingkat keamanan pangan di wilayah kabupaten. Program ini memiliki realisasi kinerja program yang mencapai dari target yang telah ditentukan, sebesar 101,52%. Walaupun seluruh program pengampu sasaran strategis satu memiliki capaian melebihi target kinerja yang ditentukan, tetap perlu melalukan strategi pencapaian program baik dari sisi ketersedian pangan, akses pangan, pemanfaatan pangan (kemampuan masyarakat untuk memanfaatkan pangan/konsumsi), stabilitas pangan serta keamanan pangan agar capaian sasaran strategis tetap dapat memenuhi target akhir renstra.

Untuk mewujudkan **sasaran strategis perangkat daerah yang kedua (2)** yaitu Meningkatnya Produksi Perikanan dengan indikator kinerja : Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan. Capaian pada sasaran strategis dengan indikator “Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan” tercapai 0,20 % dari target akhir renstra 0,22% capaian sebesar 90,91%. Program ini memiliki intervensi berupa fasilitasi sarana dan prasarana budidaya perikanan serta fasilitasi pembinaan dan pelatihan ketrampilan

pembudidaya ikan. Upaya yang dilakukan antara lain melalui program-program sebagai berikut :

1. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
2. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
3. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan

Program pengelolaan perikanan tangkap, memiliki indikator persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap. Intervensi program ini meliputi fasilitasi sarana dan prasarana nelayan PUD (perairan umum darat) meliputi hibah alat pancing ramah lingkungan serta pelatihan ketrampilan nelayan PUD. Program pengelolaan perikanan budidaya melakukan intervensi melalui sarana dan prasarana budidaya ikan kepada kelompok pembudidaya dan RTM (rumah tangga miskin), pelatihan budidaya ikan bagi kelompok pembudidaya, pengawasan kesehatan ikan bagi kelompok pembudidaya serta operasional UPT. PBAT (Pengembangan Perikanan Budidaya Air Tawar) Ngoro dan Bareng. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, program ini melakukan intervensi dalam peningkatan konsumsi ikan masyarakat serta ketrampilan pengolahan ikan untuk kelompok pengolahan dan pemasaran

ikan. Pada sasaran strategis kedua (2) ini belum dapat memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan maka perlu dibuat rencana aksi program kegiatan secara optimal serta monitoring rencana aksi untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan maupun kegagalan yang mungkin terjadi serta upaya penyelesaian masalah sekaligus tindak lanjut yang harus dilakukan agar supaya program/kegiatan berjalan dengan baik dan memberikan dampak/manfaat yang significant bagi masyarakat.

Beberapa faktor yang mendukung tercapainya target diatas diantaranya ketersediaan benih yang mencukupi dan berkualitas, pemberian bantuan sarana prasarana kepada pelaku usaha perikanan (pembudidaya, pembenih maupun nelayan), pembinaan yang intensif, pelatihan keterampilan budidaya untuk menumbuhkan minat masyarakat untuk melakukan usaha budidaya ikan yang bisa dilaksanakan di areal yang sempit /lahan terbatas dengan memanfaatkan kolam terpal. Pembinaan dan

pendampingan yang intensif untuk nelayan perairan umum darat (PUD).

Untuk mewujudkan **sasaran strategis perangkat daerah yang ketiga (3)** yaitu Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator kinerja : Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah. Realisasi sasaran strategis ini sebesar 80,37 dari target akhir renstra 83,12 sehingga memperoleh capaian sebesar 96,69%. Sasaran strategis ini diampu oleh program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota.

3.1.4 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Realisasi Kinerja Di Level Nasional/Internasional

Tabel 3.1.4
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**90,5**	**93,5**	**Angka Skor PPH Nasional Tahun 2024**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	0,85%		-
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	96 % Energi dan 106,8% Protein	97,7 % Energi dan 108,2% Protein	**Angka Skor PPH Nasional Tahun 2024**
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan pangan	0%		
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan	100%		
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**0,20%**	**3,90%**	**Publikasi : portaldata.kkp.go.id**
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Presentase pertumbuhan	0,13%	1,97%	**Publikasi : portaldata.kk**

	produksi ikan tangkap			**p.go.id**
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Presentase pertumbuhan produksi ikan budidaya	0,20%	3,96%	**Publikasi : portaldata.kkp.go.id**
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp. 1.782.694. 477,14		

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Nasional	Ket
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A (80,37)**	**A (84,19)**	**Nilai SAKIP Prop Jatim**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%		

Realisasi skor PPH kabupaten Jombang tahun 2024 sebesar 90,5 masih dibawah skor PPH nasional sebesar 93,5 sehingga masih perlu intervensi pemerintah daerah yang terintegrasi untuk bisa meningkatkan pencapaian skor PPH kabupaten. Hal ini dikarenakan skor PPH merupakan instrument/parameter untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk, baik jumlah maupun komposisi pangan menurut jenis pangan. Semakin tinggi skor PPH, konsumsi pangan semakin beragam, bergizi dan seimbang (maksimal 100). Skor PPH menjadi sangat penting karena merupakan indikator mutu gizi dan keragaman konsumsi pangan sehingga dapat digunakan untuk merencanakan kebijakan konsumsi pangan. Nilai skor PPH merupakan refleksi dari tingkat keberagaman konsumsi masyarakat, sehingga apabila dibandingkan dengan skor PPH PPH nasional, skor PPH kabupaten jombang masih relative rendah karena hal ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan masyarakat, tingkat pendapatan masyarakat, tingkat kebiasaan konsumsi masyarakat, keragaman pola asuh dimana tingkat kemajemukan masyarakat di kabupaten tentu saja berbeda dengan level nasional.

Dalam pencapaian indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah dilakukan beberapa kegiatan strategis antara lain, pengawasan keamanan pangan, pengembangan desa mandiri pangan B2SA (beragam, bergizi, seimbang dan aman), sosialisasi B2SA, bimbingan teknis warung B2SA dan dapur B2SA. Dengan telah dilakukannya kegiatan strategis diatas, dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang sesuai dengan kaidah pola pangan harapan.

Pertumbuhan Produksi Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 terealisasi sebesar 0,20%, sedangkan persentase pertumbuhan produksi ikan nasional sebesar 3,90%. Untuk produksi perikanan Kabupaten Jombang perlu terus berupaya meningkatkan pertumbuhan produksi perikanan secara *continue*. Pertumbuhan produksi ikan kabupaten sangat dipengaruhi oleh produksi ikan budidaya dan tangkap, dimana produksi ikan budidaya sangat tergantung pada biaya produksi terutama pakan pabrikan dan kemampuan pemasaran. Permasalahan utama dari sektor perikanan merupakan memasarkan hasil panen dengan nilai jual yang baik, sehingga proses budidaya ikan menjadi sangat berat ketika pembudidaya harus terus mengeluarkan biaya tinggi untuk pemberian pakan ikan yang seharusnya sudah terjual sehingga pada saat itu banyak pembudidaya yang tidak melanjutkan kegiatan usahanya. Dan pada tahun 2024 kondisi perekonomian mekanisme pemasaran antar wilayah merupakan salah satu mekanisme pemasaran hasil produksi perikanan, meskipun demikian memang tidak terjadi lonjakan peningkatan produksi budidaya yang sangat significant karena pembudidaya yang rata-rata merupakan pembudidaya kecil, dengan kondisi harga pakan pabrikan yang terus mengalami peningkatan harga serta tingginya penyakit ikan yang dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Salah satu upaya yang dilakukan dinas dalam rangka mendorong pembudidaya untuk giat kembali dalam kegiatan usaha perikanan adalah melalui pendampingan berupa pemberian bimtek/pelatihan teknis, pemberian fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya yang didanai oleh APBD Kabupaten, APBD Provinsi

maupun APBN. Untuk produksi ikan tangkap bergantung pada kondisi cuaca dan kondisi perairan umum, melalui kegiatan restocking (penebaran benih ikan di perairan umum) yang dilakukan oleh dinas diharapkan dapat menjadi salah satu pendukung kelestarian sumberdaya perairan yang ada di Kabupaten Jombang selain itu untuk mendukung nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan maka dinas memberikan fasilitasi berupa bantuan alat tangkap ikan ramah lingkungan. Secara umum, untuk produksi perikanan baik budidaya maupun tangkap tidak bisa dibandingkan dengan kabupaten/kota lain maupun provinsi dan nasional, karena masing- masing daerah mempunyai potensi alam maupun luas lahan serta karakteristik yang berbeda-beda, dengan demikian pertumbuhan produksi perikanan juga akan berbeda pada masing-masing daerah. Hasil produksi perikanan dari masing-masing daerah kabupaten/kota akan berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi perikanan pada tingkat provinsi maupun nasional. Sasaran strategis ini diampu oleh beberapa program, antara lain :

a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan restocking di perairan umum, fasilitasi sarana penangkapan ikan bagi KUB
b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan pembinaan kelompok pembudidaya, bimbingan teknis perikanan, fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya
c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui kegiatan bimtek pengolahan ikan serta pemantapan Gemarikan.

3.1.5 Analisis Atas Realisasi Kinerja

Tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan menerima penghargaan di bidang perikanan, yaitu meraih Juara Favorit kategori Menu Kudapan dalam pelaksanaan Lomba Masak Ikan Tingkat Propinsi Jawa Timur sekaligus memperingati Hari Ikan Nasional,

Serta Penghargaan sebagai Forum Peningkatan Konsumsi Ikan yang

Berperan Aktif dalam peningkatan konsumsi ikan melalui pemanfaatan inovasi di sektor Budidaya Hasil Perikanan.

Sedangkan untuk bidang bidang ketahanan pangan juga mendapatkan penghargaan Juara Harapan 1 kategori Menu Lunch Box cluster sumber karbohidrat umbi-umbian dan pameran produk komersial dengan bahan baku tepung mocaf, berupa bolen, pie dan pizza yang merupakan produk hasil kelompok binaan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan.

Sedangkan penjelasan terkait program pendukung pada setiap sasaran strategis yang telah dilakukan sebagai berikut :

Sasaran Strategis 1.

Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan berhasil tercapai skor 90,5 atau capaian realisasi sebesar 98,52 % dengan tingkat keberhasilan “Berhasil”. PPH merupakan susunan beragam pangan yang didasarkan atas proporsi keseimbangan energi dari berbagai kelompok pangan untuk memenuhi kebutuhan energi dan zat gizi lainnya, baik dalam jumlah maupun mutu dengan mempertimbangkan segi daya terima, ketersediaan pangan, ekonomi, budaya dan agama. Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi dipengaruhi oleh banyak faktor, antara lain faktor yang bersifat internal (individual) seperti pendapatan, keyakinan (budaya dan religi), serta pengetahuan gizi, maupun faktor eksternal seperti faktor produksi, ketersediaan dan keragaman ketersediaan, distribusi, serta promosi/iklan. Dari banyak faktor tersebut Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berupaya terus meningkatkan perannya melalui

program kegiatan yang bisa mewujudkan Skor Pola Pangan Harapan bisa mencapai skor ideal, diantaranya yang mendukung keberhasilan kinerja tahun 2024 adalah adanya program sebagai berikut :

- Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, dengan kegiatan antara lain adalah fasilitasi hibah rice milling unit (RMU) dan timbangan duduk untuk pengembangan Desa Mandiri Pangan B2SA, hibah isi lumbung pangan, pengadaan cadangan pangan pemerintah daerah.
- Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, melalui kegiatan antara lain pembinaan pemanfaatan kebun B2SA dan pembinaan warung B2SA pada Desa Mandiri Pangan B2SA, pemberian PMT bahan pangan bergizi untuk balita stunting, pembinaan olahan pangan, pembinaan lumbung dan perberasan, survey harga pangan strategis serta gelar pangan murah. Hanya ada kegiatan pemberian hibah bahan pangan bergizi untuk keluarga resiko stunting yang tidak bisa terlaksana dikarenakan kesalahan pemilihan kode rekening dan adanya kesalahan pemaketan transaksi pengadaan dalam pelaksanaan kegiatan Gelar Pangan Murah, sehingga tidak bisa terealisasi sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
- Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan didukung kegiatan pengujian keamanan pangan dan pembinaan keamanan pangan
- Program Penanganan Kerawanan Pangan, melalui FGD penanganan desa rawan pangan

Beberapa faktor yang menjadi kendala atau penghambat dalam pencapaian sasaran adalah

1. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang konsumsi pangan B2SA (Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman) sehingga masyarakat cenderung masih memiliki kebiasaan konsumsi dari jenis padi-padian dan kelompok protein nabati. Sedangkan konsumsi bahan pangan lain seperti konsumsi buah, sayur, kacang-kacangan, pangan hewani, kelompok umbi-umbian belum maksimal atau relatif kecil dan kurang dari anjuran yang ada. Hal ini menunjukkan bahwa merubah kebiasaan konsumsi sebagian besar masyarakat dari konsumsi padi sebagai sumber pangan pokok untuk

beralih ke sumber karbohidrat yang lain tidak mudah.

Faktor pendukung dalam pencapaian kinerja sasaran strategis antara lain :

1. Peningkatan sosialisasi hasil survey konsumsi berbasis Pola Pangan Harapan kepada masyarakat serta menyampaikan hasil dokumen PPH Kabupaten kepada OPD lintas sektor terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Peternakan, Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Dinas Kesehatan agar dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan pada perencanaan berikutnya, karena Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tidak mampu mengintervensi secara langsung terkait produksi, harga pangan strategis, gizi dan stunting dan masih banyak lagi yang berkaitan dengan urusan pangan sehingga sangat perlu adanya sinergitas multi sektor.
2. Pengadaan rapid test bahan pangan, sebagai acuan dalam pengecekan keamanan pangan segar yang ada di pasaran
3. Peningkatan sosialisasi hasil pengecekan keamanan pangan kepada petani pangan segar dan penggilingan
4. Peningkatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan tindak lanjut rekomendasi hasil peta ketahanan dan kerentanan pangan serta hasil uji laboratorium keamanan pangan

Sasaran Strategis 2.

Meningkatnya Produksi

Perikanan dengan indikator Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan berhasil tercapai 0,20% atau capaian realisasi sebesar 100 % dengan tingkat keberhasilan “Berhasil”. Dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan yang sangat membutuhkan dukungan ketersediaan benih dan induk berkualitas, pengetahuan SDM (Sumber Daya Manusia) perikanan baik teknis, kelembagaan maupun pengolahan serta kemudahan dan kelancaran dalam pemasaran maka beberapa program kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tersebut antara lain melalui program :

- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan kegiatan restocking

di perairan umum, fasilitasi sarana penangkapan ikan bagi KUB

- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya, dengan kegiatan pembinaan kelompok, bimbingan teknis budidaya ikan pendukung pengembangan Desa Mandiri Pangan B2SA, fasilitasi hibah sarana perbenihan dan budidaya. Serta pengembangan kegiatan Sambang Budiman () sebagai sarana sosialisasi perikanan kepada pelajar dan masyarakat umum untuk meningkatkan minat masyarakat Kabupaten Jombang.

- Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, melalui kegiatan bimtek pengolahan ikan kepada kelompok binaan dan masyarakat pada Desa Mandiri Pangan B2SA serta sosialisasi Gemarikan.

Selain faktor-faktor pendukung/pendorong diatas ada beberapa kendala ikan/pembudidaya untuk berkelompok, antara lain :

1. Rendahnya minat dalam usaha budidaya.
2. Rendahnya nilai jual produk hasil perikanan
3. Anomali perubahan cuaca yang menyebabkan tingginya kejadian penyakit ikan
4. Biaya produksi budidaya yang tinggi di kebutuhan pakan pabrikan yang harganya terus meningkat
5. Adanya residu limbah industri dan rumah tangga sehingga menggangu ekosistem perairan umum darat

Adapun alternatif solusi yang bisa dilakukan dalam rangka mengatasi permasalahan adalah meningkatkan bimbingan teknis/ pelatihan CBIB budidaya perikanan dan CPIB untuk pembenihan perikanan; meningkatkan kegiatan Pokmaswas serta kegiatan restocking untuk menjaga ekosistem perairan umum darat serta meningkatkan produksi perikanan tangkap. Meningkatkan kerjasama dengan swasta untuk menyerap hasil produksi perikanan serta meningkatkan pelatihan pengolahan ikan untuk meningkatkan nilai jual produk hasil perikanan; dan memfasilitasi pemasaran produk hasil budidaya perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Faktor pendukung pencapaian sasaran strategis yaitu :

1. Inovasi aplikasi Si Patin Ceria yang merupakan pengembangan

dari aplikasi Sipekkan (sebagai salah satu alat penghubung/komunikasi antara pembudidaya dengan petugas pengawasan perikanan serta kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan) dan aplikasi Sipekkat (sebagai salah satu alat penghubung/komunikasi antara kelompok pengolahan dan pemasaran hasil perikanan dengan petugas kabupaten)

Sasaran Strategis 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, untuk nilai evaluasi AKIP OPD yang telah mencapai target yang telah ditentukan dengan predikat "Memuaskan" dengan skor 80,37 akan tetapi tetap perlu adanya peningkatan pada aspek pengukuran kinerja di internal perangkat daerah, beberapa kendala yang masih ditemukan adalah belum selarasnya capaian kinerja pegawai. Alternatif yang harus dilakukan adalah peningkatan internalisasi akuntabilitas kinerja perangkat daerah serta melaksanakan monitoring dan evaluasi atas rencana aksi yang telah dilakukan serta penilaian capaian kinerja pegawai secara rutin dan tersistem.

Dari 3 (tiga) sasaran strategis tersebut didukung oleh 8 (delapan) program, dapat dijelaskan bahwa hampir seluruh program yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang untuk kinerja terealisasi sesuai dengan target. Adapun analisis program yang mendukung keberhasilan/kegagalan antara lain adalah :

- Pada program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan, didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dapat mendukung peningkatan cadangan pangan diantaranya adalah fasilitasi hibah sarana prasarana bagi kelompok lumbung. Pada tahun 2024 untuk fasilitasi hibah bagi kelompok lumbung terealisasi isi lumbung, dan prasarana pendukung seperti timbangan duduk serta *rice milling unit* (RMU). Selain itu pada tahun 2024 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan berhasil melakukan penambahan pengadaan beras untuk cadangan pangan pemerintah daerah yang bekerjasama dengan BULOG Kancab Mojokerto sebagai pengelola CPPD sebanyak 57,957 ton.
- Pada Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, terdapat kegiatan survey konsumsi berbasis Pola Pangan

Harapan dapat dijelaskan bahwa untuk pola konsumsi masyarakat sudah mulai beragam akan tetapi masih perlu ditingkatkan keberagamannya karena dari 9 jenis kelompok bahan pangan masih terdapat 3 jenis bahan pangan yang harus diperbaiki oleh masyarakat yaitu untuk konsumsi pangan terhadap buah dan sayur, umbi-umbian dan pangan hewani karena masih dibawah skor ideal. Untuk mendukung pola konsumsi masyarakat yang beragam, bergizi, seimbang dan aman maka didukung dengan adanya kegiatan pembinaan B2SA, kegiatan pelatihan olahan pangan lokal, pemberian bantuan PMT bahan pangan bergizi kepada balita stunting, kegiatan lomba cipta menu, festival pangan tradisional, pembinaan mutu dan keamanan pangan, pembinaan kelompok lumbung pangan, pembinaan lembaga distribusi pangan, gelar pangan murah dan kegiatan kebun B2SA, Warung B2SA yang terintegrasi pada program Desa Mandiri Pangan B2SA yang telah dilakukan pada dua (2) desa pilot project yaitu Desa Made, Kec Kudu dan Desa Wonosalam, Kec Wonosalam.

Selain kegiatan pengembangan kepada masyarakat, dilakukan juga penyusunan neraca bahan makanan (NBM), system kewaspadaan pangan dan gizi (SKPG), prognosa pangan, informasi harga bahan pangan tingkat pedagang eceran, pedagang grosir dan produsen.

- Program Pengawasan Keamanan Pangan yaitu didukung kegiatan berupa pengujian sampel pangan segar serta rekomendasi atas hasil pengujian laboratorium keamanan pangan segar
- Program Penanganan Kerawanan Pangan yaitu berupa kegiatan monitoring dan evaluasi dan pembinaan pada desa rawan pangan sesuai dengan hasil Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan tahun 2023
- Program Pengelolaan Perikanan Tangkap didukung dengan kegiatan *restocking* ikan di perairan umum darat (PUD), pendataan ikan tangkap, hibah sarana perikanan tangkap, bimbingan teknis nelayan
- Program Pengelolaan Perikanan Budidaya didukung dengan kegiatan bimtek bagi UPR dan pembudidaya, penilaian kelas kelompok budidaya perikanan, pembinaan dan penyuluhan kelembagaan usaha perikanan, pendataan produksi ikan budidaya, bimbingan teknis penyakit ikan serta fasilitasi hibah sarana budidaya, pengadaan sarana perbenihan di UPT

pengembangan program SAMBANG BUDIMAN di UPT, monitoring dan evaluasi kesehatan ikan, uji kualitas air dan ikan pada pembudidaya, serta pelaksanaan kaji terap SAP (sentra aquabis perikanan). Seluruh kegiatan tersebut adalah dalam rangka mendukung peningkatan produksi perikanan dan pada tahun 2024 terdapat kenaikan produksi perikanan. Untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat, antara lain :

1. Rendahnya minat dalam usaha budidaya.
2. Rendahnya nilai jual produk hasil perikanan
3. Tingginya kasus penyakit ikan yang menyerang

- Program Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan, didukung oleh kegiatan pelatihan olahan hasil perikanan, dalam rangka mendukung peningkatan produksi olahan hasil perikanan di kabupaten, selain itu juga dalam rangka mendukung peningkatan konsumsi ikan kabupaten dilaksanakan kegiatan fasilitasi pelaku usaha pelaku pengolahan hasil produksi perikanan, sosialisasi Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan) dengan menghadirkan balita stunting yang diberikan fillet ikan sebanyak 600 kg untuk peserta Gemarikan.

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang pada tahun 2024 mendapat Anggaran Belanja Langsung dari APBD Kabupaten sebesar Rp. 11.340.809.154,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 10.530.279.055,- atau sebesar 92,85 %.

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Pada Tahun 2024, Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang mengampu 3 sasaran strategis, 8 program dan pagu anggaran sebesar Rp 11.340.809.154,- untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsinya. Adapun perbandingan realisasi kinerja dan realisasi anggaran dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.1 Perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi anggaran :

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**91,86**	**90,5**	**98,52%**	**4.413.326.694**	**3.970.085.352**	**90%**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan	0,85%	0,86%	101,18%	1.687.705.544	1.578.922.500	93,55
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	100% Energi dan 100% Protein	96% Energi dan 106,8% Protein	101%	2.478.962.950	2.156.492.102	86,99
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan	0%	0%	100%	167.658.200	165.212.600	98,54
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Pangan	98,5%	100%	101,52%	79.000.000	69.458.150	87,92
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**0,20%**	**0,20%**	**100%**	**1.349.599.233**	**1.282.706.250**	**95%**

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Pertumbuhan produksi ikan Tangkap	0,14%	0,13%	92,86%	80.395.700	74.475.200	92,64
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase Pertumbuhan produksi ikan Budidaya	0,20%	0,20%	100%	701.044.433	655.797.500	93,55
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Nilai tambah hasil olahan perikanan	Rp 1.675.123.832,92	Rp. 1.782.694.477,14	106,42%	568.159.100	552.433.550	97,23
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**A (82,96)**	**A(80,37)**	**96,88%**	**5.577.883.227**	**5.277.487.453**	**94,61**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	5.577.883.227	5.277.487.453	94,61

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari dua (2) indikator sasaran strategis perangkat daerah memiliki capaian realisasi anggaran yang tidak maksimal, belum dapat memenuhi target yang telah ditentukan, yaitu pada sasaran strategis satu (1) dan sasaran strategis ketiga (3) indicator kinerja skor pola pangan memiliki capaian kinerja sebesar 98,52% dan realisasi capaian anggaran 90%. Adapun realisasi capaian kinerja program yang mendukung pada indicator kinerja skor pola pangan harapan sebagai berikut program pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan sebesar 101,18%, sedangkan realisasi capaian anggaran sebesar 93,55%; pada program peningkatan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat memiliki capaian kinerja dan anggaran sebesar 101% serta 86,99%; program penanganan kerawanan pangan memiliki capaian kinerja dan anggaran sebesar 100% dan 98,54% serta program pengawasan keamanan pangan memiliki capaian kinerja sebesar 101,52% dan capaian anggaran

sebesar 87,92%. Secara umum keempat program penunjang indicator sasaran strategis memiliki capaian kinerja dan anggaran yang tergolong Baik.

Untuk indicator kinerja persentase pertumbuhan produksi ikan memiliki realisasi kinerja sebesar 100% dengan capaian anggaran sebesar 95%. Program pendukung indicator kinerja tersebut ada tiga program, antara lain program pengelolaan perikanan tangkap dengan capaian kinerja sebesar 92,86% dan capaian anggaran sebesar 92,64%; kemudian program pengelolaan perikanan budidaya memiliki capaian kinerja sebesar 100% serta capaian anggaran sebesar 93,55% dan untuk program terakhir yaitu program pengolahan dan pemasaran hasil perikanan memiliki capaian kinerja sebesar 106,42% dan capaian anggaran sebesar 97,23%. Secara umum capaian program pendukung indicator kinerja persentase pertumbuhan produksi ikan dalam kategori baik. Indikator kinerja pada sasaran strategis kedua (2) dapat memenuhi target yang telah ditentukan.

Untuk indicator kinerja yang ketiga yaitu nilai evaluasi AKIP perangkat daerah memiliki capaian kinerja sebesar 96,88% dan capaian anggaran sebesar 94,61%, indicator tersebut memiliki satu program pendukung yaitu program penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dengan realisasi capaian kinerja dan anggaran sebesar 100% dan 94,61%. Pada indicator kinerja ketiga juga tergolong dalam kategori baik. Secara umum capaian untuk ketiga indicator kinerja sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tergolong dalam kategori Baik.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Efisiensi merupakan tolak ukur keberhasilan yang dinilai dari besarnya anggaran yang dipergunakan untuk mencapai hasil dari program yang dilaksanakan. Adapun efisiensi penggunaan sumberdaya pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan untuk mencapai outcome dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumberdaya

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**98,52%**	**90%**	**8,52%**
Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	Persentase Cadangan Pangan Masyarakat	101,18%	93,55	7,63%
Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG	101%	86,99	14,01%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase daerah rentan rawan Pangan	100%	98,54	1,46%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan Pangan	101,52%	87,92	13,6%
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**100%**	**95%**	**5%**
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase pertumbuhan produksi ikan Tangkap	92,86%	92,64	0,22%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Persentase pertumbuhan produksi ikan Budidaya	100%	93,55	6,45%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil	Nilai tambah hasil olahan perikanan	106,42%	97,23	9,19%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
Perikanan				
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	**96,88%**	**94,61**	**2,27%**
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata-rata capaian kinerja Aparatur	100%	94,61	5,39%

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa efisiensi penggunaan sumberdaya sasaran strategis beserta dengan programnya, dari ketiga indikator sasaran strategis perangkat daerah memiliki tingkat efisiensi, sebagai berikut :

1. Sasaran strategis yang menunjukkan rasio tingkat efisiensi terbesar adalah indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar 8,52%, dengan capaian kinerja sebesar 98,52% dan penyerapan anggaran sebesar 90%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :
   a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk kedaulatan dan Kemandirian Pangan dengan indikator persentase cadangan pangan masyarakat, dengan capaian kinerja sebesar 101,18% dan penyerapan anggaran sebesar 93,55% sehingga tingkat efisiensinya 7,63%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan beras cadangan pangan pemerintah daerah. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.
   b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan indikator persentase capaian konsumsi pangan terhadap AKG, dengan capaian kinerja sebesar 101% serta penyerapan anggaran sebesar 86,99% sehingga tingkat efisiensinya 14,01%. Efisiensi anggaran disebabkan adanya perubahan BNBA penerima hibah bahan pangan bergizi untuk keluarga resiko stunting serta kesalahan pemilihan kode rekening untuk biaya pengiriman Gerakan Pangan Murah, sehingga tidak bisa terealisasi dengan baik.
   c. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan indikator persentase daerah rentan rawan pangan, dengan capaian kinerja sebesar 100% serta penyerapan anggaran sebesar 98,54% sehingga tingkat efisiensinya 1,46%.

Efisiensi disebabkan adanya silpa anggaran pada biaya perjalanan dinas, dikarenakan menyesuaikan undangan.

d. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan indikator persentase pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan, dengan capaian kinerja sebesar 101,52% dan penyerapan anggaran sebesar 87,92% sehingga tingkat efisiensinya 13,6%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja bahan kimia, yaitu pengadaan rapid test kit residu pestisida. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.

2. Rasio tingkat efisiensi yang berikutnya pada indikator sasaran strategis persentase pertumbuhan produksi ikan sebesar 5% dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 95%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :

   a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan tangkap, dengan capaian kinerja sebesar 92,86% dan penyerapan anggaran sebesar 92,64% sehingga tingkat efisiensinya 0,22%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja benih ikan untuk kegiatan restocking. Nilai standart satuan harga lebih tinggi dari nilai realisasi benih di pasaran. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia

   b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya dengan indikator persentase pertumbuhan produksi ikan budidaya, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 93,55% sehingga tingkat efisiensinya 6,45%. Adanya silpa anggaran belanja jasa uji laboratorium, disebabkan adanya maintenance alat uji logam berat dan bakteri e-coli pada laboratorium UPT PMP2KP Pagesangan, Surabaya selaku laboratorium uji sampel air sumber pembudidaya yang mengikuti sertifikasi CBIB dan CPIB. Serta adanya silpa belanja benih ikan, pakan ikan pada kegiatan budidaya ikan pada Sentra Aquatik Perikanan dan belanja hibah barang sarapan prasarana perikanan, dikarenakan standar satuan harga lebih tinggi dari harga realisasi. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia

   c. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan dengan indikator nilai tambah hasil olahan perikanan, dengan capaian kinerja sebesar 106,42% dan

penyerapan anggaran sebesar 97,23% sehingga tingkat efisiensinya 9,19%. Efisiensi anggaran merupakan silpa pengadaan belanja fillet ikan dan bahan praktek untuk kegiatan gerakan makan ikan. Nilai standart satuan harga lebih tinggi dari nilai realisasi fillet ikan di pasaran. Dengan upaya negosiasi harga barang dengan penyedia.

3. Untuk indicator sasaran strategis Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah memiliki rasio tingkat efisiensi sebesar 2,27%, dengan capaian kinerja sebesar 96,88% dan penyerapan anggaran sebesar 94,61%. Untuk tingkat efisiensi pada masing-masing program yang mengampu sasaran strategis tersebut yaitu :
   a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator persentase rata-rata capaian kinerja aparatur, dengan capaian kinerja sebesar 100% dan penyerapan anggaran sebesar 94,61% sehingga tingkat efisiensinya 5,39%. Silpa anggaran pada belanja gaji dan tambahan penghasilan pegawai serta belanja penambah daya tahan tubuh pegawai serta belanja tagihan telepon dan tagihan listrik.

Tabel 3.2.3 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Pegawai

Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Kepala Dinas	**1**	**1**	**100%**
Sekretaris	1	1	100%
Perencana Ahli Muda	0	1	0%
Perencana Ahli Pertama	0	1	0%
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Muda	1	1	100%
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Pertama	0	1	0%
Analis Keuangan Pusat dan Daerah Ahli Madya	0	1	0%
Kepala Sub bagian umum dan kepegawaian	1	1	100%
Kepala Bidang Ketersediaan, Distribusi dan Cadangan Pangan	1	1	100%
Kepala Bidang Penganekaragaman, Konsumsi dan	1	1	100%

Keamanan Pangan			
Kepala Bidang Produksi Perikanan	1	1	100%

Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Kepala Bidang Agribisnis	1	1	100%
Kepala UPT Budidaya Perikanan	1	1	100%
Analis Ketahanan Pangan Ahli Muda	6	7	85,71%
Analis Ketahanan Pangan Ahli Pertama	1	7	14,29%
Analis Ketahanan Pangan Ahli Madya	0	2	0%
Pengawas Perikanan Ahli Muda	1	2	50%
Pengawas Perikanan Ahli Pertama	1	2	50%
Pengawas Perikanan Ahli Madya	0	1	0%
Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Muda	0	1	0%
Pengelola Pengembangan Budidaya dan Pemasaran Perikanan	1	1	100%
Pengelola Kepegawaian	0	1	0%
Pengadministrasi Umum	0	1	0%
Pengelola Surat	0	1	0%
Pengemudi	0	1	0%
Petugas Keamanan	0	1	0%
Pramu Bakti	0	1	0%
Pengelola Pemanfaatan Barang	1	1	100%
Bendahara	1	1	100%
Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	0	1	0%

Pengelola Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	0	1	0%

Jabatan	Bezeting	Kebutuhan	Persentase Pemenuhan
Pengelola Distribusi dan Pemasaran	0	1	0%
Pengelola Ketahanan Pangan	1	2	50%
Pengelola Penganekaragaman Pangan	0	1	0%
Pengelola Pola Pangan Harapan	0	1	0%
Analis alat Penangkap Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan	0	1	0%
Analis Perikanan Budidaya	1	1	100%
Penyusun Rencana Bahan Teknis Prasarana dan Saraa Budidaya	0	1	0%
Analis Pengelolaan Sumber Daya Ikan	0	1	0%
Analis Kenelayanan	0	1	0%
Analis Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	1	100%
Analis Potensi Perbenihan	0	1	0%
Analis Mutu Hasil Perikanan	0	1	0%
Pengelola Pengembangan Pembinaan Usaha	0	1	0%
Pengelola Kesehatan Ikan Ahli Pertama	0	1	0%
Asisten Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Terampil	0	1	0%
Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Pertama	1	1	100%
Analis Pasar Hasil Perikanan Ahli Madya	0	1	0%
Pengawas Pertanian Ahli Muda	1	1	100%
Pengawas Pertanian Ahli Pertama	0	1	0%
Pengawas Pertanian Ahli Madya	0	1	0%

Rerata Pemenuhan	**38,81%**

No	Jenis Pegawai	Jumlah
1	**PNS**	**25**
	Eselon II	1
	Eselon III	5
	Eselon IV	2
	Fungsional Khusus (JFT)	12
	Pelaksana	6
2	**NON PNS**	**26**
	Tenaga Honorer Dinas	26
	Tenaga Pendamping	0
TOTAL		**51**

Tabel 3.2.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Manusia

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Pemenuhan Pegawai	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**98,52%**	**38,81%**	**59,71%**
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**100%**	**38,81%**	**61,19%**
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**96,88%**	**38,81%**	**58,07%**
Rerata Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia				**59,66%**

Dari tabel 3.2.3 Persentase pemenuhan kebutuhan pegawai Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, kebutuhan pejabat berdasarkan jabatan sebanyak 51 jabatan dan terisi sebanyak 26 jabatan atau 38,81%. Adapun jumlah pegawai pada tahun 2024 sebanyak 51 orang, dengan capaian pemenuhan pegawai sebesar 38,81%.

Sedangkan capaian kinerja untuk sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat sebesar 98,52% sehingga efisiensi sumberdaya manusia untuk sasaran strategis pertama sebesar 59,71%. Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya produksi perikanan memiliki capaian kinerja sebesar 100% sehingga efisiensi sumberdaya manusia sebesar 61,19% dan sasaran strategis ketiga memiliki capaian kinerja sebesar 96,88% sehingga efisiensi sumber daya manusia sebesar 58,07%. Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan memiliki efisiensi sumberdaya manusia rata-rata sebesar 59,66%.

Tabel 3.2.5 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
1	Tanah Bangunan Kantor Pemerintah (perikanan)	2	2	100
2	Tanah Tambak/Empang/Kolam Ikan/Akuarium (bareng & ngoro)	2	2	100
3	Mesin Pembuat Pellet	1	1	100
4	Transportable Generating Set	1	1	100
5	Pompa Air	5	5	100
6	Station Wagon	4	4	100
7	Sepeda Motor	34	34	100
8	kendaraan bermotor beroda dua lainnya (Assesoris Sepeda Motor + Blok Stiker Jupiter dan KLX)	4	4	100
9	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (Hidroulik otomastis)	1	1	100
10	ph meter (Quasi Peak Meter)	4	4	100
11	Lemari Penyimpan	1	1	100
15	Alat Peternakan lainnya (Conikel Tank + Perlengkapannya)	10	10	100
16	Alat Peternakan lainnya (Rak Conikel)	10	10	100
17	Alat Peternakan lainnya (Blower/Airator)	1	1	100
18	Alat Peternakan lainnya (tabung oksigen)	1	1	100
19	Lemari Besi/Metal	1	1	100

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
20	Lemari Kayu	9	9	100
21	Rak Kayu	5	5	100
22	Filing Cabinet Besi	14	14	100
23	Brandkas	1	1	100
24	Lemari Kaca	2	2	100
25	White Board	2	2	100
26	Alat Penghancur Kertas	1	1	100
27	Mesin Absensi	1	1	100
28	Overhead Projector (Infocus)	1	1	100
29	Kursi Kayu	1	1	100
30	Meja Rapat	3	3	100
31	Tempat Tidur Kayu	26	26	100
32	Meja 1/2 Biro	59	59	100
33	Kursi Tamu	1	1	100
35	Kursi Putar	5	5	100
36	Kursi Biasa	46	46	100
37	Kursi Lipat	5	5	100
39	Meja Komputer	1	1	100
40	Sofa	5	5	100
41	Meubeleur lainnya (pigora)	8	8	100
43	UPS	1	1	100
44	AC standing	1	1	100
45	Mesin Pemotong Rumput	1	1	100
46	Lemari Es	5	5	100
47	A.C. Window	3	3	100
48	A.C. Split	20	20	100
49	Kipas Angin	11	11	100
50	Kompor Gas (Alat Dapur)	4	4	100
51	Rice Cooker (Alat Dapur)	5	5	100
52	Tabung Gas	1	1	100
53	Alat Dapur lainnya (Meja Dispencer)	5	5	100
54	Alat Dapur lainnya (Galon Maaqo)	5	5	100
55	Televisi	4	4	100
56	Sound System	3	3	100
57	Wireless	1	1	100
58	Microphone Table Stand	1	1	100

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
59	Camera film	1	1	100
60	Aquarium (Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	19	19	100
61	Dispenser	5	5	100
62	Handy Cam	1	1	100
63	Gordyin/Kray	113	113	100
64	Alat Rumah Tangga Lain-lain (gapuro festifal pangan)	1	1	100
65	Alat Rumah Tangga Lain-lain (tandon air)	1	1	100
66	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	2	100
67	Meja Kerja Pejabat Eselon III	7	7	100
68	Meja Kerja Pejabat Eselon IV	11	11	100
69	Meja Kerja Pejabat lain-lain	1	1	100
70	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2	2	100
71	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	9	9	100
72	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12	12	100
73	Buffet Kaca	2	2	100
74	Microphone	3	3	100
76	peralatan studio audio lainnya (Colum Speaker)	2	2	100
77	peralatan studio audio lainnya (amplifier)	1	1	100
78	peralatan studio audio lainnya (horn speaker)	1	1	100
79	Camera Electronic	12	12	100
80	Layar Film/Projector	8	8	100
81	Telephone (PABX)	2	2	100
82	Facsimile	3	3	100
83	Alat Kedokteran umum lainnya	1	1	100
84	alat kedokteran bedah lainnya (dst)	1	1	100
85	Alat Kesehatan Umum lainnya (Pembelian Cup Sealer	1	1	100
86	Camero Photo Micrograph	1	1	100
87	alat laboratorium logam, mesin dan listrik lainnya (dst)	1	1	100

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
88	PH Meter (Alat Laboratorium Umum)	3	3	100
89	Spineret	1	1	100
90	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	1	1	100
91	Unit Penggilingan	1	1	100
92	Mangkok Porselin	1	1	100
93	Mikroskop	1	1	100
94	DO Meter (Alat Laboratorium Kwalitas Air Dan Tanah)	4	4	100
95	Test Kit	1	1	100
96	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst)(soil pH)	2	2	100
97	alat laboratorium kwalitas air dan tanah lainnya (dst) (secchi disk)	2	2	100
98	Alat Khusus Keamanan Lainnya (cctv 1 paket 6 unit) +1	2	2	100
99	P.C Unit	8	8	100
100	Lap Top	19	19	100
101	Note Book	25	25	100
102	Hard Disk	4	4	100
104	Monitor	2	2	100
105	Printer (Peralatan Personal Komputer)	55	55	100
106	Peralatan Personal Komputer lainnya (Hardisk dll)	8	8	100
108	Netware Interface External	1	1	100
109	Peralatan Komputer lainnya (Absensi elektronik sidik jari)	1	1	100
110	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5	5	100
111	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	4	4	100
112	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	1	1	100

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
113	Bangunan Gedung Pertemuan Permanen	2	2	100
114	Gedung Pos Jaga Permanen	2	2	100
115	Bangunan Kolam/Bak Ikan	7	7	100
116	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	7	7	100
117	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	1	1	100
118	Mess/Wisma/Bungalow/Te mpat Peristirahatan Permanen	1	1	100
119	Sumur Dengan Pompa (Bangunan Pengambilan Irigasi)	2	2	100
120	Saluran Air Kotor Sambungan Dari Rumah	1	1	100
121	Instalasi Gardu Listrik Induk Kapasitas Kecil	1	1	100
122	Instalsi Pusat Pengatur Listrik Lain-lain	1	1	100
123	Jaringan air minum lainnya	1	1	100
124	Jaringan Distribusi Lain-lain	1	1	100
125	Maket & Foto Dokumen Lain-lain	1	1	100
126	Alat Pasca Panen Lainnya (Alat Penepungan)	1	1	100
127	Alat Peternakan Lainnya (Mesin Kicir Merk Nagrong)	1	1	100
128	Alat Peternakan lainnya (Blower Ikan)	1	1	100
129	Bangku Tunggu	1	1	100
130	Kasur/Spring Bed	10	10	100
131	Meubeleur lainnya (Bedcover/Seprey	22	22	100
132	Jam Elektronik	5	5	100
133	Telephone Hybrid	2	2	100
134	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	1	1	100
135	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	1	1	100

NO	URAIAN	KETERS EDIAAN	STANDA R KEBUTU HAN	PERSENTASE PEMENUHAN (%)
136	Tenda	4	4	100
TOTAL		802	802	100

Tabel 3.2.6 Efisiensi Penggunaan Sarana dan Prasarana

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Sarpras	Tingkat Efisiensi
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	**Skor Pola Pangan Harapan**	**98,52%**	**100%**	**-1,48%**
Meningkatnya Produksi Perikanan	**Persentase Pertumbuhan Produksi Ikan**	**100%**	**100%**	**0%**
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Perangkat Daerah	**Nilai Evaluasi AKIP Perangkat Daerah**	**96,88%**	**100%**	**-3,12%**
Rerata Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia				**-1,53%**

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari sumberdaya sarana prasarana yang dimiliki oleh perangkat daerah memiliki rata-rata tingkat efisiensi mengalami in efisiensi sebesar -1,53%,hal ini dikarenakan dari tiga (3) sasaran strategis program, hanya satu (1) sasaran yang mencapai target yang telah ditentukan. Adapun tingkat efisiensi tiap sasaran strategis sebagai berikut, untuk sasaran strategis pertama yaitu meningkatnya ketahanan pangan masyarakat mengalami in efisiensi sebesar -1,48% dengan capaian kinerja sebesar 98,52%; sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya produksi perikanan tidak mengalami efisiensi, perhitungan tingkat efisiensi 0% dengan capaian kinerja yang didapat sama besar dengan ketercukupan sarana prasarana dan sasaran strategis ketiga yaitu meningkatnya akuntabilitas dan kinerja perangkat daerah mengalami in efisiensi sebesar -3,12% dengan capaian kinerja sebesar 96,88%. Rata-rata capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan tahun 2024 sebesar 98,46% sedangkan tingkat pemenuhan sarana prasarana sebesar 100% berdasarkan dokumen RKBMD (Rencana Kebutuhan Belanja Modal Daerah)

tahun 2024.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

Adapun upaya yang akan dilakukan sebagai alternative perbaikan kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan antara lain :

1. Menyusun Peraturan Daerah terkait ketahanan pangan;
2. Meningkatkan forum koordinasi multisektor dalam penanganan daerah rawan pangan;
3. Meningkatkan publikasi terkait diversifikasi dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
4. Peningkatan edukasi konsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA);
5. Mengoptimalkan instruksi terkait diversifikasi pangan local, melalui snack pangan local “Kaya Pangan”;
6. Mengembangkan desa mandiri pangan BISA;
7. Melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan daerah melalui OKKPD;
8. Meningkatkan publikasi terkait konsumsi ikan;
9. Meningkatkan jejaring pemasaran produk hasil perikanan;
10. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil perikanan;
11. Meningkatkan Restocking yaitu kegiatan penebaran ikan diperairan umum untuk menjaga pelestarian lingkungan perairan dan meningkatkan produktivitas perairan;
12. Meningkatkan monitoring penyakit ikan dengan cara memberikan fasilitasi untuk pengujian sampel air (sebagai media budidaya) maupun ikan kepada POKDAKAN;
13. Pemberian fasilitasi hibah sarana usaha perikanan dan perikanan tangkap;
14. Optimalisasi program SAMBANG BUDIMAN;

15. Mengoptimalkan sosialisasi penggunaan aplikasi Si Patin Ceria;
16. Mengoptimalkan pelatihan pembuatan pakan alternatif;
17. Mengoptimalkan pelatihan tema CBIB dan CPIB;
18. Meningkatkan sosialisasi edukasi terkait potensi budidaya perikanan;
19. Mengoptimalkan pendampingan sertifikasi CBIB dan CPIB bagi pembudidaya;
20. Mengoptimalkan kerjasama dengan pihak swasta sebagai *off taker* hasil produksi perikanan;
21. Mengembangkan kemitraan dengan pihak swasta sebagai bapak asuh sekaligus *off taker* hasil produksi perikanan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024 merupakan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2024 – 2026 yang berisi tentang capaian indikator kinerja kegiatan, program dan sasaran yang telah dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang.

Secara umum capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang tahun 2026 mencapai target, hal ini didukung dengan 1 (satu) indikator terealisasi sesuai target dan 2 (dua) indikator belum terealiasi sesuai target yang telah ditetapkan, seperti yang telah dijelaskan pada Bab III. Sedangkan untuk capaian penyerapan anggaran sebesar 92,85% dari total anggaran sebesar Rp. 11.340.809.154,- terealiasi Rp. 10.530.279.055,-.

Beberapa tindak lanjut dalam pencapaian yang akan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang ke depan adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Peraturan Daerah terkait ketahanan pangan;
2. Optimalisasi cadangan pangan pemerintah daerah;
3. Inisiasi cadangan pangan pemerintah desa;
4. Meningkatkan forum koordinasi multisector dalam penanganan daerah rawan pangan ;
5. Meningkatkan publikasi terkait diversifikasi dan penganekaragaman konsumsi pangan lokal;
6. Mengoptimalkan instruksi terkait diversifikasi pangan local, melalui snack pangan local “Kaya Pangan”;
7. Pengembangan desa mandiri pangan B2SA pada 21 kecamatan;
8. Melakukan peningkatan pengawasan keamanan pangan daerah melalui OKKPD;

9. Meningkatkan publikasi terkait konsumsi ikan;
10. Meningkatkan jejaring pemasaran produk hasil perikanan dan produk hasil olahan perikanan;
11. Meningkatkan kualitas dan daya saing produk hasil perikanan;
12. Meningkatkan Restocking yaitu kegiatan penebaran ikan diperairan umum untuk menjaga pelestarian lingkungan perairan dan meningkatkan produktivitas perairan;
13. Meningkatkan monitoring penyakit ikan dengan cara memberikan fasilitasi untuk pengujian sampel air (sebagai media budidaya) maupun ikan kepada POKDAKAN;
14. Optimalisasi pendampingan CBIB & CPIB;
15. Optimalisasi program SAMBANG BUDIMAN;
16. Pemberian fasilitasi hibah sarana usaha perikanan ;
17. Mengoptimalkan pelatihan pembuatan pakan alternatif;
18. Meningkatkan sosialisasi edukasi terkait potensi budidaya perikanan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang Tahun 2024 ini kami buat sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta kinerja yang telah dicapai berdasarkan kewenangan yang diberikan sesuai dengan ketentuan dan pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku semoga bisa menjadi menjadi tolak ukur dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Jombang, Februari 2025

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan

Ditandatangani secara elektronik

SUDIRO SETIONO, S.Sos., M.Si
NIP 197605012001121002